

**DAYA SAING, PROFITABILITAS, DAN EFISIENSI USAHATANI PADI
DAN JAGUNG DI INDONESIA**

(Studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**



DIAJUKAN OLEH:

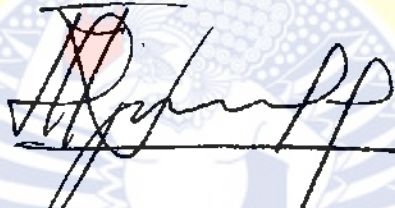
**ADITYA PRATAMA
NIM : 041211132015**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

Surabaya, 25/7/2016

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. Ec. Tri Haryanto, MP., Ph.D

SKRIPSI

**DAYA SAING, PROFITABILITAS, DAN EFISIENSI USAHATANI PADI
DAN JAGUNG DI INDONESIA**

(Studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)

DIAJUKAN OLEH:

ADITYA PRATAMA

NIM : 041211132015

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Ec. TRI HARYANTO, MP., Ph.D

TANGGAL.....18/8/2016

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. MURYANI, Dra. Ec. M. Si., MEMD

TANGGAL.....18/8/2016

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Aditya Pratama, 041211132015), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Juli 2016

Penulis,



Aditya Pratama

NIM: 041211132015

DECLARATION

I, (Aditya Pratama, 041211132015), declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under may name, nor a piracy and plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities/collages.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referreed to by quoting the author's name and state in the references.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and othe sanction in accordance with the prevailing norm and regulation in Airlangga University.

Surabaya, 25 July 2016

Declared by,



Aditya Pratama

NIM: 041211132015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin, kasih, rahmat, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Daya Saing, Profitabilitas, dan Efisiensi Usahatani Padi dan Jagung di Indonesia (Studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur) ”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat gelar Sarjana Ekonomi. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Dr. Muryani, Dra. Ec. M.si., MEMD selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
3. Drs. Ec. Tri Haryanto, MP., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membina, memberikan petunjuk dan koreksi, serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dra. Ec. Dyah Wulansari, M.Ec. Dev., Ph.D. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan masukan terkait masalah perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Khojin dan Ibu Sumiati yang senantiasa memberikan doa restu, dukungan dan fasilitas serta menjadi motivasi terbesar penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Adik-adik tercinta yaitu Andyka Yoga Saputra dan Sherin Angela Putri yang senantiasa memberikan dukungan doa dan support moral kepada penulis.

7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
8. Staff Administrasi Departemen S-1 Ekonomi Pembangunan, Staff Akademik, Staff Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atas pelayanannya kepada penulis untuk memenuhi kewajiban administratif.
9. Staff Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Terima Kasih atas pelayanan dan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman satu perantauan Azis, Rendri, Rofiq, Antok, Dody, Rudi, Faiz, Fary, Dedi, Dinan, Aswin, Danny yang telah senantiasa menghibur penulis disaat suka dan duka.
11. Teman-teman satu kontrakan Khusaini, Ivan, Sanches, Hafidz, Helmi, Delly, Lucky, yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Fariz, Andre, Galih, Fatur, Anton, Naufal, Rovian, Rizky Arya, Anif, Citra Isnaini, Rido Ilavi, Dio, Agus Sri, Ferdy, Rudy, Bendot, Miftachul Arifin, Dito, Didi, Agus Purnomo, Alfian, Mada, terima kasih atas candaan, motivasi dan saran yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Alumni XII IPA 2 SMAN 1 Ponorogo angkatan 2011 yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan menggapai kesuksesan ke depannya.
14. Teman-teman Alumni SMAN 1 Ponorogo angkatan 2011 yang telah memotivasi selama penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman EP angkatan 2012 terutama untuk mahasiswa konsentrasi ekonomi perencanaan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Teman-teman BPH Hima Ekonomi Pembangunan 2014 , terima kasih atas ilmu dan pengalamannya di bidang keorganisasian terhadap penulis.
17. Teman-teman Pengurus Hima Ekonomi Pembangunan 2013 dan 2014, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya di bidang keorganisasian terhadap penulis.
18. Teman-teman Pengurus WEBS 2013 dan 2014, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya di bidang keorganisasian terhadap penulis.
19. Teman-teman KKN-BBM 51 UNAIR Desa Bonorejo, Gayam, Bojonegoro.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa segala pengerahan kemampuan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca.

Surabaya, Juli 2016

Penulis

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
DAFTAR No. :

ABSTRAK
SKRIPSI SARJANA EKONOMI

NAMA : ADITYA PRATAMA
NIM : 041211132015
TAHUN PENYUSUNAN : 2016

JUDUL:

Daya Saing, Profitabilitas, dan Efisiensi Usahatani Padi dan Jagung di Indonesia
(Studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)

ISI:

Padi dan Jagung adalah komoditas strategis, oleh karena itu pemerintah selalu menjaga ketersediannya. Jawa Timur merupakan salah satu produsen utama padi dan jagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing, profitabilitas, efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui data Analisis Ekonomi Usahatani serta harga internasional padi dan jagung dari instansi terkait dan publikasi ilmiah. Metode analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil analisis PAM menunjukkan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai keuntungan privat dan sosial serta mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai indikator daya saing dan efisiensi. Kebijakan pemerintah secara keseluruhan mampu memproteksi usahatani padi namun belum mampu memproteksi usahatani jagung. Analisis sensitivitas menunjukkan keuntungan dan daya saing usahatani sensitif terhadap perubahan pada nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, kenaikan tarif impor komoditas, dan perubahan harga komoditas baik secara domestik maupun internasional. Studi ini menyarankan bahwa usahatani perlu meningkatkan produksi padi dan jagung untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dunia dan mengoptimalkan potensi wilayah serta pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan yang belum mampu memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif kebijakan dengan memperhatikan kondisi pasar dalam negeri.

Kata Kunci: daya saing, efisiensi, kebijakan pemerintah, profitabilitas, sensitivitas,
Policy Analysis Matrix (PAM)

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY

STUDY : EKONOMI PEMBANGUNAN

No. LIST :

ABSTRACT

BACHELOR THESIS OF ECONOMICS

NAME : ADITYA PRATAMA

NIM : 041211132015

YEAR OF PREPARATION : 2016

TITLE:

*Competitiveness, Profitability and Efficiency of Rice and Maize in Indonesia
(Studies in Ponorogo East Java Province)*

DESCRIPTION:

Rice and maize is a strategic commodity, therefore the government always maintain availability. East Java is one of the main producers of rice and maize. The purpose of this study was to determine the competitiveness, profitability, and efficiency of government policy on farming rice and maize in Ponorogo. The data in this research is secondary data obtained through the data of Economic Analysis of Farm and international prices of rice and maize from relevant agencies and scientific publications. The analytical method used is the Policy Analysis Matrix (PAM). PAM results show that rice farming and maize in Ponorogo have private and social profitability and have competitive and comparative advantage as an indicator of competitiveness and efficiency. The government policy as a whole is able to protect rice farming but have not been able to protect farming maize. The sensitivity analysis shows the advantages and competitiveness of farming is sensitive to changes in the exchange rate against the US dollar, rising commodity import tariffs, and changes in commodity prices both domestically and internationally. This study suggests that farming needs to increase the production of rice and corn to reduce dependence on the world market and optimize the potential of the region and the government needs to examine more policies that have not been able to protect farming and implement alternative policies with regard to market conditions in the country.

Keywords: competitiveness, efficiency, government policies, profitability, sensitivity, Policy Analysis Matrix (PAM)

DAFTAR ISI

Lembar siap diujikan	i
Lembar persetujuan	ii
Pernyataan orisinalitas skripsi	iii
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Daya Saing	12
2.1.2 Keunggulan Komparatif	12
2.1.3 Keunggulan Kompetitif	16
2.1.4 Efisiensi Usahatani	17
2.1.5 Kerangka Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertanian ..	21
2.1.6 <i>Input – Output</i> dalam Usahatani	31

2.1.7 <i>Policy Analysis Matrix</i> (PAM)	35
2.2 Penelitian Sebelumnya	40
2.3 Kerangka Berfikir	43
BAB 3 METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data	52
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	52
3.5 Teknik Analisis	53
3.5.1 Analisis Keuntungan (<i>Profitabilitas</i>).....	54
3.5.2 Daya Saing dan Efisiensi	55
3.5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah	56
3.5.3.1 Kebijakan <i>Output</i>	56
3.5.3.2 Kebijakan <i>Input</i>	57
3.5.3.2 Kebijakan <i>Input – Output</i>	58
3.5.4 Analisis Sensitivitas	60
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum	62
4.1.1 Gambaran Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo. .	62
4.1.2 Gambaran Input – Output Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo.....	63
4.1.3 Gambaran Harga Input – Output Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo.....	67

4.2 Hasil Analisis	71
4.2.1 Hasil Policy Analysis Matrix (PAM).....	71
4.2.2 Keuntungan Privat.....	72
4.2.3 Keuntungan Sosial	74
4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Analisis Divergensi	77
4.3.2 Analisis Rasio di dalam Tabel PAM.....	80
4.3.3 Analisis Sensitivitas	90
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Simpulan	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015.....	2
Tabel 1.2	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015.....	3
Tabel 1.3	Lima Kab/Kota Produktivitas Padi Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013	4
Tabel 1.4	Lima Kab/Kota Produktivitas Jagung Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013.....	4
Tabel 2.1	Identitas Matrix Dalam PAM	35
Tabel 3.1	Penentuan Harga Paritas Impor	48
Tabel 3.2	Penentuan Harga Paritas Ekspor	49
Tabel 3.3	<i>Policy Analysis Matrix</i>	52
Tabel 4.1	Jumlah Rata-rata Tenaga Kerja dalam Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo	63
Tabel 4.2	Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi	66
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan PAM Usahatani Padi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015	69
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan PAM Usahatani Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.....	70
Tabel 4.5	Indikator Rasio Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015	75

Tabel 4.6	Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Nilai Tukar.....	85
Tabel 4.7	Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Perubahan Harga Output Sebesar 25%	86
Tabel 4.8	Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Kenaikan Tarif Impor Komoditas	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Efisiensi.....	17
Gambar 2.2 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi Pada <i>Input Tradable</i>	25
Gambar 2.3 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi Pada <i>Input Non Tradable</i>	27
Gambar 2.4 Kurva Dampak Tarif Impor	29
Gambar 2.5 Kerangka Pikir	44



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Dalam RPJMN tahap 3 (2015 - 2019) dijelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Peranan sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) disamping sektor industri dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dibuktikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia sebesar 13,38 % di tahun 2014 atau sekitar 1410,66 triliun dari total jumlah PDB 2014 sebesar 10.542,7 triliun. (BPS, 2014)

Jika dilihat dari nilai absolutnya, maka kontribusi sektor pertanian terhadap PDB merupakan jumlah yang besar, sehingga seharusnya dapat dianalogikan bahwa petani seharusnya menerima pendapatan yang memadai untuk dapat hidup

sejahtera. Namun pada kenyataannya, apabila dilihat melalui peta kemiskinan di Indonesia, kiranya dapat dipastikan bahwa bagian terbesar penduduk yang miskin adalah yang bekerja di sektor pertanian (Tambunan, 2003:72). Hal ini menyebabkan bidang pertanian harus dapat memacu diri untuk dapat meningkatkan produk pertaniannya, khususnya produk pertanian tanaman pangan.

Padi merupakan tanaman pangan strategis karena beras merupakan kebutuhan pangan pokok bagi lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Berdasarkan data hasil Susenas – BPS, konsumsi beras per kapita cenderung menurun yakni dari 107,71 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 97,40 kg/kapita/tahun pada tahun 2013. Produksi beras dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun cenderung laju pertumbuhannya melandai. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk Indonesia melaju dengan cepat, yakni 1,49% per tahun pada periode 2000-2010. Dengan kenyataan ini maka total konsumsi domestik beras di Indonesia akan terus meningkat walaupun per kapitanya menunjukkan penurunan.

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang menjadi target dari perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian karena jagung dapat dimanfaatkan selain sebagai makanan manusia juga dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Bahkan kebutuhan jagung untuk bahan pakan ternak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan untuk makanan manusia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat dari tahun 2009 – 2013 proporsi penggunaan jagung dari total kebutuhan sebesar 40% - 50% untuk bahan baku pakan ternak, 30% sebagai bahan baku industri makanan dan sisanya sebagai bahan konsumsi

langsung. Kebutuhan industri pakan ternak terhadap komoditi jagung nasional diperkirakan mencapai 7 juta ton/tahun.

Jawa Timur merupakan salah satu pemasok utama beras dan jagung nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di tahun 2015, produktivitas padi sebesar 61,13 kw/ha dengan luas panen 2,15 juta ha dengan produksi sebesar 13,15 juta ton dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG). (tabel 1.1)

Tabel 1.1
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
2011	1.807.393	55,0	10.029.728
2012	1.838.381	63,0	11.499.199
2013	2.037.021	59,15	12.049.342
2014	2.072.630	59,81	12.397.049
2015	2.152.070	61,13	13.154.967

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu lima tahun (2011 – 2015), luas panen dan produksi padi di Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan tahun tertinggi terjadi di tahun 2015 sebesar 13,15 juta ton dengan luas panen 2,15 juta ha. Sedangkan produktivitas padi selama 5 tahun (2011 – 2015) menunjukkan tren yang fluktuatif dengan produktivitas tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 61,13 kw/ha. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan luas panen dan produksi padi di Jawa Timur antara lain dikarenakan adanya percepatan tanam atau peningkatan Indeks Pertanaman dan peningkatan jaringan irigasi dan bantuan pompa air kepada

para petani yang cukup membantu dalam proses pertumbuhan padi. (BPS Jatim, 2015)

Sedangkan untuk komoditas jagung selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2011 -2015), luas panen, produktivitas, dan produksi jagung (dalam bentuk pipilan kering) di Jawa Timur menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan karena terjadi alih pola tanam dari jagung ke padi dan fenomena cuaca (El nino) di beberapa sentra produksi jagung di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
2011	1.204.063	45,0	5.443.705
2012	1.232.523	51,0	6.295.301
2013	1.199.544	48,03	5.760.959
2014	1.202.300	47,72	5.737.382
2015	1.213.654	50,52	6.131.163

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Ponorogo merupakan salah Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai keunggulan di bidang pertanian dan menjadi salah satu sentra produksi padi dan jagung di Jawa Timur yang berpotensi bagi pengembangan usahatani padi dan jagung. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur bahwa Kabupaten Ponorogo menjadi lima tertinggi produktivitas komoditi padi dan jagung di propinsi Jawa Timur di tahun 2013 (tabel 1.3 dan 1.4).

Tabel 1.3**Lima Kabupaten/Kota Dengan Produktivitas Komoditas Padi Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
Kab. Malang	59.839	437.597	73
Kab. Pasuruan	91.207	610.037	67
Kab. Magetan	46.242	302.405	65
Kab. Ponorogo	60.539	396.852	65
Kab. Trenggalek	24.642	159.362	65

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur

Tabel 1.4**Lima Kabupaten/Kota Dengan Produktivitas Komoditas Jagung Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
Kab. Nganjuk	29.449,00	235.951,13	80,12
Kab. Ponorogo	35.163,00	246.564,23	70,12
Kab. Jombang	28.410,00	197.352,95	69,47
Kota Probolinggo	4.001,00	26.681,95	66,69
Kota Kediri	907,00	6.020,40	66,38

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur

Luas panen untuk produksi 2 komoditas tersebut di tahun 2013 masing-masing 60.539 ha untuk padi dan 35.163 ha untuk jagung dengan masing-masing produksi padi 396.852 ton per tahun dengan produktivitas 65 kw/ha dan produksi jagung 246.564,23 ton per tahun dengan produktivitas 70,12 kw/ha. (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur, 2013).

Visi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019 yaitu terbangunnya sistem pertanian modern dengan program ke depan adalah mewujudkan Ponorogo sebagai penghasil pangan dengan sistem organik. Visi ini diangkat karena 73% masyarakat

Kabupaten Ponorogo mata pencahariannya dari sektor pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian harus mempunyai produk unggulan terlebih produk unggulan tanaman pangan sehingga perlu peningkatan dari segi produktivitas usahatani. Produktivitas ini tidak terlepas dari *input* produksi (faktor produksi) seperti lahan/sawah, benih/bibit, pupuk, obat-obatan, permodalan, dan tenaga kerja. Selain itu teknologi yang digunakan adalah mesin dan kegiatan operasional seperti BBM (Bahan Bakar Minyak), perawatan, dan biaya proses produksi sampai ke pedagang. Masing-masing komponen diatas merupakan sebuah sistem usahatani padi dan jagung yang saling terkait satu sama lain hingga akhirnya akan meningkatkan pendapatan pelaku usahatani (petani) tersebut.

Namun bertolak belakang dengan potensi yang ada, Kabupaten Ponorogo dihadapkan fakta bahwa orientasi petani tanaman pangan (padi dan jagung) masih terpaku dengan minimalisasi biaya produksi dan belum ke arah maksimalisasi keuntungan. Jika hal ini terus berlangsung secara terus menerus maka bukan hal mustahil nantinya produk hasil tanaman pangan Kabupaten Ponorogo akan kalah dengan produk impor komoditas serupa sehingga mau tidak mau usahatani yang ada harus memiliki daya saing. Dalam hal ini, daya saing suatu komoditas dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi usahatani. Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sedangkan daya saing dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (Murtiningrum, 2013).

Indikator keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dapat dihitung menggunakan alat Analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Analisis ini merupakan suatu analisis untuk dapat memperkirakan bahwa sumberdaya-sumberdaya yang dimanfaatkan untuk memproduksi komoditas tertentu mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Untuk mengetahui keunggulan komparatif usahatani di tiap komoditas, maka BSD dapat dianalisis dengan menggunakan harga sosialnya. Sedangkan keunggulan kompetitifnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis BSD harga aktualnya. (Andriani dan Hanani, 2010)

Namun di dalam Analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD), tidak memperhitungkan pengaruh dampak divergensi dan kebijakan pemerintah di tiap komoditas usahatani. Padahal dampak divergensi timbul karena salah satu dari dua sebab yaitu kegagalan pasar atau distorsi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah penting untuk melihat kemungkinan apakah produksi komoditas didalam negeri dapat bersaing di dalam pasar global. Perlu analisis lebih lanjut tentang pengukuran daya saing, profitabilitas, dan efisiensi komoditas usahatani dimana hal ini dapat dianalisis dengan metode PAM (*Policy Analysis Matrix*). Seringkali analisis PAM ini digunakan pada penelitian usahatani tanaman pangan mengingat pangan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat seperti beras (nasi) dan jagung. Disamping itu juga jagung dapat dimanfaatkan selain sebagai makanan manusia juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak.

PAM (*Policy Analysis Matriks*) atau Matriks analisis kebijakan adalah kerangka analisis yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson (1989:14) tentang entry pembukuan ganda yang membantu pembuat kebijakan untuk mengatasi isu sentral mengenai perkembangan kebijakan pertanian. PAM secara luas digunakan untuk mengukur dampak kebijakan pada daya saing dan tingkat keuntungan petani, pengaruh investasi publik pada efisiensi sistem pertanian, dan efek dari penelitian pertanian dan pengembangan pada efisiensi ekonomi dan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. PAM memperhitungkan pengaruh biaya dan pengembalian produksi dan investasi proyek-proyek pertanian. (Fatah, 2015).

Pendapatan usahatani dibandingkan biaya input menentukan seberapa besar pendapatan dan tingkat keuntungan (*profitabilitas*) usahatani. Efisiensi biaya penggunaan sumber daya akan menentukan daya saing usahatani dalam menghasilkan komoditi dibandingkan dengan komoditi impor. Sedangkan kebijakan pemerintah mempengaruhi profitabilitas dan daya saing usaha pertanian komoditas tanaman pangan dalam hal ini padi dan jagung. Untuk mencapai hal tersebut, faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan tidak hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada subsistem agribisnis lainnya seperti penanganan panen dan pascapanen, pengolahan, pemasaran dan perdagangan, sampai kebijakan subsidi harga input dan output dan perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dikaji tentang daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Indonesia (studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan diatas, maka secara rinci rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan acuan untuk petani agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya dalam kegiatan usahatani padi dan jagung.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan pertanian.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lingkupnya lebih luas dan lebih mendalam.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; beberapa landasan teori tentang daya saing, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, kerangka analisis kebijakan pertanian, input-ouput usahatani, ketahanan pangan, matriks analisis kebijakan (*Policy Analysis Matrix*, PAM); penelitian sebelumnya; hipotesis; dan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; pendekatan penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini Kabupaten Ponorogo sebagai hasil penelitian, serta pembahasan hasil yang ada.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang diperlukan akan hasil dari penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Daya Saing

Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan suatu komoditi untuk dapat bertahan di pasar dalam negeri dan bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Esterhuizen dkk (2008) mendefinisikan daya saing (competitiveness) sebagai kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dalam hal mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam lingkungan global selama biaya imbangannya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan.

Kuncoro (2008:24), menjelaskan bahwa daya saing merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Wolff (2007) mendefinisikan daya saing pada tiga tingkatan, yakni pada level perusahaan, industri, dan juga level nasional atau negara. Daya saing ini juga mencakup kepada keberhasilan perusahaan di pasar internasional dengan sedikit pengaruh (intervensi) pemerintah, ataupun subsidi. Pada prakteknya, daya saing pada tingkat perusahaan dapat dilihat dari sisi dalam perusahaan (internal), ataupun sisi luar perusahaan (eksternal). Menurut Rajagukguk (2009), pada tingkat industri daya saing merupakan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam skala nasional untuk dapat bertahan secara berkesinambungan di tengah-tengah perusahaan-perusahaan pesaing. Sedangkan daya saing dalam skala negara, diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk mencapai keberhasilan yang lebih

tinggi dimana daya saing ini diukur melalui produktivitas dan sebaran modal yang dimiliki.

Saptana (2012) menjelaskan bahwa dalam perkembangannya konsep daya saing dapat dipetakan dalam perspektif ekonomi mikro maupun makro. Kajian dari perspektif mikro diharapkan berguna dalam pembangunan pertanian terutama untuk menentukan pilihan komoditas dan upaya mewujudkan keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Sementara itu dalam kajian pespektif makro diharapkan berguna membangun daya saing nasional melalui berbagai kebijakan makro terutama melalui kebijakan fiskal di sektor riil. Sedangkan dalam kajian perspektif mikro, daya saing suatu komoditi dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi usahatani. Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Pendekatan daya saing dapat dilihat dari dua indikator, yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

2.1.2. Keunggulan Komparatif

Konsep daya saing (competitiveness) pada awalnya mengacu dari konsep yang dikemukakan oleh Adam Smith di tahun 1776 tentang teori keunggulan absolut yang dipadukan dengan teori perdagangan (Trade Theory) dimana kesejahteraan adalah gugus dari faktor endowment (sumber daya). (Lindert dan Kindleberger, 1993:4). Inti dari teori absolut tersebut adalah bahwa apabila diantara dua negara mempunyai keunggulan absolut atas sumberdaya yang dimilikinya,

maka perdagangan diantara kedua negara tersebut akan meningkatkan kesejahteraan. (Esterhuizen, 2006)

Namun David Ricardo (Salvatore, 1997:27) menyampaikan bahwa teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan diantaranya :

1. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis barang dibanding dengan negara lain?

Sebagai gambaran awal, misalnya di satu negara memiliki faktor produksi dan tenaga kerja lebih menguntungkan dibanding negara lainnya, maka dapat dikatakan negara tersebut lebih unggul dan lebih produktif dalam menghasilkan barang daripada negara lainnya. Dengan kondisi diatas dapat disimpulkan jika kondisi suatu negara lebih produktif atas dua jenis barang, maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan.

2. Apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional?

Pada konsep keunggulan komparatif yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional adalah berapa banyak biaya atas input yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi motif melakukan perdagangan bukan sekadar mutlak lebih produktif dalam menghasilkan barang atau jasa, tetapi lebih kepada se efisien mungkin penggunaan biaya atas input yang digunakan. Teori keunggulan komparatif mengutarakan, sebaiknya suatu negara berspesialisasi dan mengeksport barang-barang dimana suatu negara

tersebut memiliki keunggulan komparatif. Artinya dalam konteks biaya, setiap negara akan memperoleh keuntungan jika mengekspor barang-barang yang biaya produksinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Atau dapat pula diartikan produktivitas relatif yang dimiliki oleh negara tersebut dalam memproduksi barang-barang yang diekspor adalah yang paling tinggi. (Basri, 2010:35)

Teori hukum keunggulan komparatif David Ricardo kemudian disempurnakan lebih modern oleh Hecksher-Ohlin (H-O). Hecksher-Ohlin berpendapat bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang ketersediannya di negara tersebut relatif melimpah dan murah, sedangkan disisi lain akan mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan faktor produksi yang di negaranya relatif langka dan mahal. Teorema tersebut memberikan penjelasan mengenai proses terbentuknya keunggulan komparatif pada suatu negara berdasarkan perbedaan dalam kelimpahan faktor atau kepemilikan faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara (Salvatore, 1997:27). Jadi, keunggulan komparatif terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan, dengan biaya atas input (faktor produksi) yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya input (faktor produksi) di negara lain.

Menurut *Asian Development Bank* (1992) dalam Kurniawan (2011) menyatakan bahwa keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu wilayah atau negara dalam memproduksi satu unit dari beberapa komoditas dengan biaya yang relatif lebih rendah dari biaya imbalan sosialnya dari alternatif lainnya.

Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang diterapkan suatu negara untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam negeri terhadap perdagangan dunia. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa biaya produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur pada tingkat harga di pelabuhan yang berarti juga berupa harga bayangan. Dengan demikian, keunggulan komparatif merupakan alat untuk mengukur keuntungan sosial dan dihitung berdasarkan harga sosial serta harga bayangan nilai tukar mata uang bukan dihitung atas dasar harga privat.

2.1.3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk (Mangkuprawira, 2007:48). Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. (Kuncoro, 2008:25).

Terkait dengan konsep keunggulan kompetitif adalah kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara

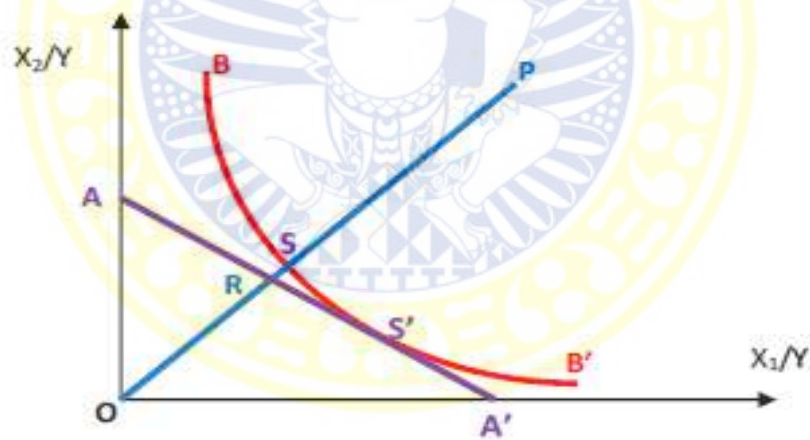
keseluruhan (Kadariah dkk, 1978). Sudaryanto dan Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau *revealed competitive advantage* yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual terlebih untuk mengukur daya saing di sektor pertanian.

Dalam analisis keunggulan kompetitif terkait erat dengan faktor penentu daya saing di tingkat perusahaan, dalam hal ini ditingkat sistem usahatani. Sedangkan keunggulan komparatif lebih menekankan pada sisi alokasi sumberdaya yang lebih efisien. Selain itu keunggulan kompetitif menggambarkan juga kondisi daya saing suatu aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai uang yang berlaku (resmi) atau berdasarkan analisis finansial. Harga pasar adalah harga yang benar-benar dibayar produsen untuk faktor produksi dan harga yang benar-benar diterima dari hasil penjualan outputnya.

2.1.4. Efisiensi Usahatani

Wihana (2001:37) menjelaskan bahwa efisiensi usahatani adalah sistem usahatani yang menghasilkan suatu nilai *output* yang maksimum dengan menggunakan sejumlah *input* tertentu baik secara kuantitas fisik maupun nilai ekonomis (harga). Efisiensi ini dapat diperoleh ketika para petani dapat menekan biaya atas penggunaan faktor-faktor produksi seperti bibit/benih, pupuk, obat-obatan (pestisida) dan tenaga kerja.

Farrel dalam Coelli dkk (1998:134) menjelaskan bahwa efisiensi terdiri dari dua komponen yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis memperlihatkan kemampuan dari usahatani memperoleh output maksimal dari jumlah input tertentu. Sedangkan efisiensi alokatif memperlihatkan kemampuan dari usahatani untuk menggunakan proporsi input optimal sesuai dengan harga dan teknologi produksi yang dimiliki. Penggabungan keduanya akan menjadi efisiensi ekonomi. Dalam penghitungan efisiensi menurut Farrel ada dua pendekatan yaitu dengan pendekatan input dan pendekatan output. Pendekatan input dijelaskan melalui kurva *isocost* yang ditunjukkan oleh kurva AA' dan *isoquant* yang ditunjukkan oleh kurva BB'.



Sumber : Farrel, 1957 (dalam Coelli, 1998:134)

Gambar 2.1
Kurva Efisiensi

Dalam kurva 2.1 digambarkan, misalkan usahatani yang diuji efisiensinya berada di titik P, jarak antara SP menunjukkan adanya inefisiensi teknis yang merupakan jumlah *input* yang dapat dikurangi jumlah *output*. pengurangan *input* ini biasanya dipresentasikan dengan rasio SP/OP untuk mencapai produksi yang

efisien secara teknis. Efisiensi teknis ini dapat dihitung dengan rasio OS/OP . Titik S merupakan titik yang efisien secara teknis karena berada di kurva *isoquant*.

Efisiensi alokatif menggunakan kriteria biaya minimum untuk menghasilkan sejumlah *output* tertentu pada *isoquant*. Karena itu diperlukan informasi rasio harga input sebagai kemiringan garis *isocost*. Jika rasio harga *input* sebagai kemiringan garis *isocost* AA', efisiensi alokatif dapat dihitung berdasarkan rasio OR/OS . Jarak RS menunjukkan pengurangan biaya yang dapat dilakukan guna mencapai efisiensi secara alokatif. Pada akhirnya titik yang efisien secara alokatif dan teknis atau dengan kata lain efisiensi secara ekonomis adalah di titik S'. Efisiensi ekonomi merupakan perkalian antara efisiensi teknis dengan efisiensi alokatif.

Sedangkan Soekartawi (2003:33) menerangkan bahwa di dalam ilmu ekonomi, pengertian efisiensi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga atau alokatif, dan efisiensi ekonomis.

1. Efisiensi Teknis

Efisiensi teknis ini mencakup hubungan antara *input* dan *output*. Menurut Miller dan Meiners (2000) efisiensi teknis (*technical efficiency*) mensyaratkan adanya proses produksi yang dapat memanfaatkan input yang sedikit demi menghasilkan output dalam jumlah yang sama.

Efisiensi teknis di dalam usahatani padi dan jagung ini dipengaruhi oleh kuantitas penggunaan faktor-faktor produksi. Kombinasi dari luas lahan serta penggunaan bibit/benih, pupuk, dan tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat

efisiensi teknis. Proporsi penggunaan masing-masing faktor produksi tersebut berbeda-beda pada setiap petani, sehingga tingkat efisiensinya pun juga berbeda-beda. Seorang petani dapat dikatakan lebih efisien dari petani lain jika petani tersebut mampu menggunakan faktor-faktor produksi lebih sedikit atau sama dengan petani lain, namun dapat menghasilkan tingkat produksi yang sama atau bahkan lebih tinggi dari petani lainnya.

2. Efisiensi Harga

Efisiensi harga/alokatif menunjukkan hubungan biaya dan *output*. efisiensi harga tercapai jika suatu perusahaan (usahatani) tersebut mampu memaksimalkan keuntungan yaitu menyamakan nilai produk marjinal setiap faktor produksi dengan harganya. (Mc Eachern, 2001:57)

3. Efisiensi Ekonomis

Efisiensi ekonomis terjadi apabila dua efisiensi sebelumnya yaitu efisiensi teknis dan efisiensi harga tercapai dan memenuhi dua kondisi, antara lain :

- a. Syarat keperluan (*necessary condition*) menunjukkan hubungan fisik antara input dan output, bahwa proses produksi pada waktu elastisitas produksi antara 0 – 1. Hal ini merupakan efisiensi produksi secara teknis.
- b. Syarat kecukupan (*sufficient condition*) yang berhubungan dengan tujuannya yaitu kondisi keuntungan maksimum tercapai dengan syarat nilai produk marjinal sama dengan biaya marjinal.

2.1.5. Kerangka Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertanian

Pearson dkk (2005:8) mengemukakan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan menjadi dua yaitu kebijakan yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertanian. Kebijakan yang berpengaruh secara langsung terhadap pertanian adalah kebijakan harga. Sedangkan yang berpengaruh secara tidak langsung adalah kebijakan makroekonomi dan kebijakan investasi publik.

2.1.5.1. Instrumen kebijakan Harga

Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas (misalnya padi/beras). Kebijakan harga juga mempengaruhi input pertanian. Setiap instrumen kebijakan harga pertanian akan menimbulkan transfer baik dari produsen kepada konsumen komoditas yang bersangkutan maupun anggaran pemerintah, atau sebaliknya. Sebagai contoh kita bisa lihat tiga jenis instrumen kebijakan yang terjadi di sektor pemberasan nasional yaitu berupa pajak dan subsidi, hambatan perdagangan internasional, dan pengawasan atau pengendalian langsung (*direct control*).

Pajak dan subsidi atas komoditas pertanian menyebabkan terjadinya transfer antara anggaran negara dengan produsen dan konsumen. Dalam hal pajak, transfer sumberdaya mengalir kepada pemerintah, sementara dalam hal subsidi transfer sumberdaya berasal dari pemerintah. Sebagai contoh, subsidi produksi langsung

(*direct production subsidy*) merupakan transfer dari anggaran pemerintah kepada produsen.

Hambatan perdagangan internasional adalah pajak atau kuota yang sifatnya membatasi impor atau ekspor. Dengan melakukan hambatan perdagangan, instrumen kebijakan harga ini mengubah tingkat harga dalam negeri. Hambatan impor menaikkan harga dalam negeri diatas rata-rata harga dunia, sementara hambatan ekspor menurunkan harga dalam negeri menjadi lebih rendah dibandingkan harga dunia.

Pengendalian langsung adalah peraturan pemerintah atas harga, margin pemasaran, atau hilangnya kebebasan untuk memilih tanaman. Biasanya, pengendalian langsung harus disertai dengan hambatan perdagangan atau pajak/subsidi agar kebijakan bisa diselenggarakan secara efektif. Sebagai contoh, kebijakan dalam bentuk penentuan jenis komoditas yang harus ditanam bisa efektif apabila pemerintah menyediakan fasilitas atau kemudahan dalam hal penyediaan air dan irigasi atau input yang dibutuhkan oleh petani.

Kebijakan harga faktor domestik secara langsung mempengaruhi biaya produksi pertanian. Faktor domestik utama dalam pengembangan usahatani terdiri atas lahan, tenaga kerja, dan modal. Biaya lahan dan tenaga kerja biasanya merupakan porsi terbesar dari biaya produksi pertanian di negara berkembang. Pemerintah seringkali menerapkan kebijakan makroekonomi yang bisa mempengaruhi nilai sewa lahan, upah tenaga kerja, atau tingkat bunga yang berlaku. Kebijakan faktor domestik lainnya seperti upah minimum atau tingkat

bunga maksimum akan lebih berpengaruh terhadap satu sektor dibanding sektor yang lainnya. Beberapa negara melaksanakan kebijakan khusus dalam upaya mengatur penggunaan lahan atau mengendalikan eksploitasi lahan sumberdaya alam, seperti air dan bahan mineral. Kebijakan makro tersebut bisa juga mempengaruhi biaya produksi kegiatan usahatani.

2.1.5.2. Kebijakan Makroekonomi

Kebijakan makroekonomi mencakup seluruh wilayah dalam satu negara, sehingga kebijakan makroekonomi akan mempengaruhi seluruh komoditas. Ada tiga kategori kebijakan makroekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan nilai tukar.

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan inti dari kebijakan makroekonomi, karena secara bersama-sama mereka mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional yang diukur melalui peningkatan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar yang kemudian mempengaruhi permintaan agregat. Bila jumlah uang yang beredar lebih tinggi dari pertumbuhan agregat barang dan jasa, maka akan timbul tekanan inflasi dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal berhubungan dengan keseimbangan antara kebijakan pajak pemerintah yang meningkatkan pendapatan pemerintah dan kebijakan publik yang menggunakan pendapatan tersebut dalam hal ini didefinisikan sebagai belanja pemerintah. Apabila belanja pemerintah lebih besar dari pendapatannya, maka pemerintah mengalami defisit

anggaran (Fiskal defisit). Keadaan ini akan menimbulkan inflasi bila defisit tersebut ditutup dengan menambah suplai uang.

Kebijakan nilai tukar secara tidak langsung berpengaruh terhadap harga output dan biaya input untuk produksi komoditas pertanian. Nilai tukar adalah nilai konversi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagian besar komoditas pertanian diperdagangkan secara internasional. Hampir semua negara melakukan impor atau ekspor sebagian dari kebutuhan atau hasil produk komoditas pertanian mereka. Untuk produk-produk pertanian yang diperdagangkan secara internasional, harga dunia akan menentukan harga dalam negeri apabila tidak ada hambatan perdagangan. Dengan sendirinya, nilai tukar secara langsung mempengaruhi harga produk pertanian karena harga domestik (dinilai dalam mata uang dalam negeri) produk yang diperdagangkan sama dengan harga dunia (dinilai dalam mata uang asing) dikalikan dengan nilai tukarnya (rasio antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing).

2.1.5.3. Kebijakan Investasi Publik

Kebijakan investasi publik mengalokasikan pengeluaran investasi (modal) yang bersumber dari anggaran belanja negara. Kebijakan ini bisa mempengaruhi berbagai kelompok diantaranya produsen, pedagang, dan konsumen dengan dampak yang berbeda karena dampak tersebut bersifat spesifik pada wilayah dimana investasi itu dilakukan.

Kebijakan investasi publik biasanya didanai dari anggaran pemerintah baik itu di dalam APBN maupun APBD. Kebijakan ini digunakan untuk pembangunan

infrastruktur, sumberdaya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. Investasi publik dalam bentuk infrastruktur secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan produsen pertanian atau menurunkan biaya produksi. Yang dimaksud infrastruktur adalah barang modal penting, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan irigasi yang amat sulit dibangun oleh sektor swasta. Barang modal tersebut dikenal sebagai “barang-barang publik” yang biasanya bersumber dari anggaran pemerintah. Investasi dalam bentuk infrastruktur sifatnya spesifik wilayah serta manfaatnya sebagian besar akan dinikmati oleh produsen dan konsumen di wilayah tersebut. Kebijakan investasi publik amat rumit karena infrastruktur tersebut harus dipelihara dan diperbaharui dari waktu ke waktu.

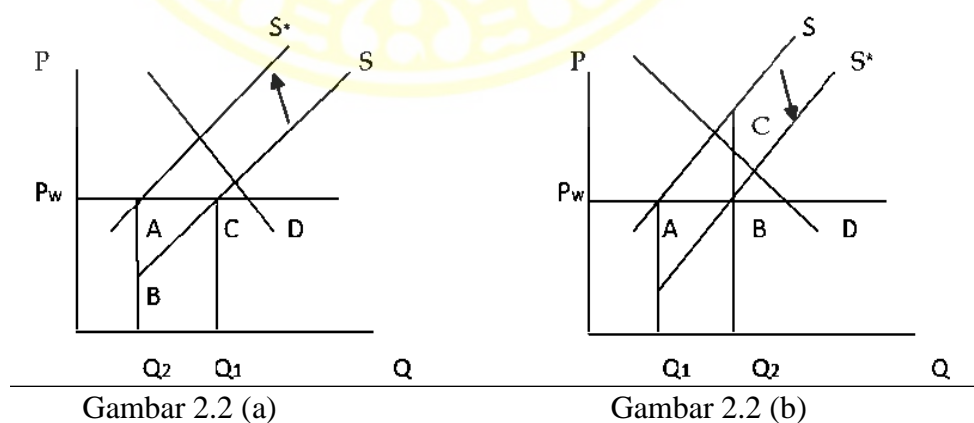
Investasi publik dalam hal sumberdaya manusia antara lain berbagai jenis pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan tingkat keahlian atau keterampilan serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Investasi dalam bentuk sekolah-sekolah formal, pusat-pusat pelatihan dan penyuluhan, fasilitas kesehatan masyarakat, pendidikan gizi masyarakat, klinik dan rumah sakit merupakan contoh-contoh investasi publik yang dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sektor pertanian. Investasi-investasi seperti ini amat menentukan dalam pembangunan jangka panjang namun perlu waktu yang lama bagi sektor pertanian untuk dapat merasakan manfaatnya.

Investasi dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi merupakan contoh lain dari barang-barang publik yang secara tidak langsung memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen pertanian. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi biasanya melakukan investasi

yang besar di bidang riset budidaya pertanian untuk mengadopsi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset internasional, seperti penggunaan benih unggul, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman tahunan. Benih-benih unggul ini seringkali memerlukan penggunaan teknologi baru, pengaturan air yang lebih baik, dan penggunaan input yang lebih banyak. Untuk beberapa komoditas, teknologi yang dibiayai dana publik, biasanya lebih pada teknologi pengolahan dibanding teknologi usahatani atau budidaya.

2.1.5.4. Kebijakan Pertanian Terhadap *Input Tradable*

Dalam produksi komoditas pertanian terdapat komponen input produksi yang diperdagangkan secara internasional. Input produksi yang diperdagangkan secara internasional disebut *input tradable*, seperti pupuk kimia, benih, dan obat-obatan. Analisis kebijakan terhadap input tradable dapat berupa pajak, subsidi, atau hambatan perdagangan. Pengaruh dari dampak kebijakan subsidi dan hambatan perdagangan dapat dilihat dalam gambar 2.2.



Sumber : Monke and Pearson, 1989 (dalam Suryana dan Agustian, 2014)

Gambar 2.2

Kurva Dampak Pajak dan Subsidi Pada *Input Tradable*

Keterangan :

2.2 (a) : Pajak untuk *input tradable*

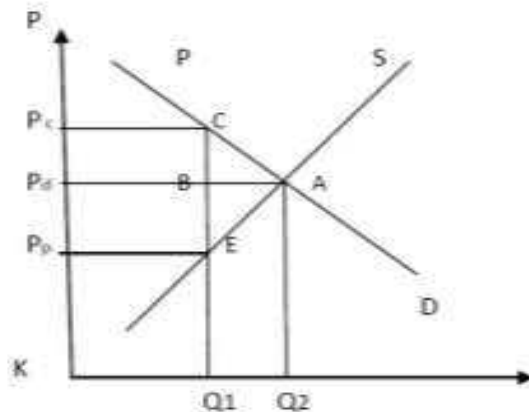
2.2 (b) : Subsidi untuk *input tradable*

Gambar 2.2 (a) menunjukkan dampak pajak terhadap input tradable yang digunakan. Pajak yang dikenakan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi sehingga pada tingkat harga output yang sama, output domestik turun dari Q_1 ke Q_2 dan kurva *supply* bergeser ke kiri. Manfaat ekonomi yang hilang adalah sebesar $A-B-C$, yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang Q_1CAQ_2 dengan biaya produksi output Q_2BCQ_1 .

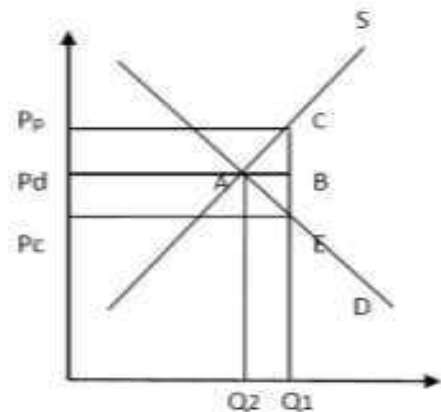
Gambar 2.2 (b) memperlihatkan dampak subsidi terhadap input tradable. Subsidi dapat mengakibatkan harga input menjadi lebih rendah atau lebih murah dan biaya produksi juga menjadi lebih rendah sehingga kurva *supply* bergeser ke kanan dan produksi naik dari Q_1 ke Q_2 . Efisiensi ekonomi yang hilang dari produksi adalah $A-B-C$, yang merupakan pengaruh perbedaan antara biaya produksi setelah output meningkat yaitu Q_1ACQ_2 dan nilai output meningkat yaitu Q_1ABQ_2 .

2.1.5.5. Kebijakan Pertanian Terhadap *Input Non Tradable*

Kebijakan terhadap input *non tradable* (input yang tidak diperdagangkan secara internasional/input domestik) dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan subsidi atau pajak. Pada gambar 2.3 dapat dilihat dampak mengenai kebijakan dan subsidi yang diterapkan pada input *non tradable*.



Gambar 2.3 (a)



Gambar 2.3 (b)

Sumber : Monke dan Pearson, 1989 (dalam Suryana dan Agustian, 2014)

Gambar 2.3

Kurva Dampak Subsidi dan Pajak Terhadap *Input non Tradable*

Keterangan :

Gambar (a) : Pajak untuk input *non tradable*

Gambar (b) : Subsidi untuk input *non tradable*

P_d : Harga domestik sebelum diberlakukan pajak dan subsidi

P_c : Harga di tingkat konsumen setelah pajak dan subsidi

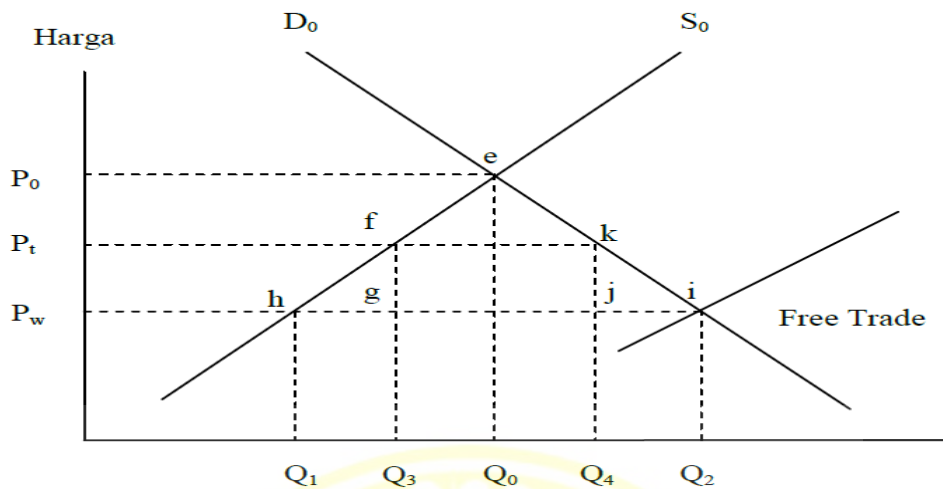
P_p : Harga ditingkat produsen setelah pajak dan subsidi

Pada gambar 2.3 (a) terlihat bahwa sebelum diberlakukan pajak terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input non tradable berada pada P_d dan Q_2 . Adanya pajak sebesar $P_c - P_p$ menyebabkan produksi yang dihasilkan turun menjadi Q_1 . Harga di tingkat produsen turun menjadi P_p dan harga yang diterima konsumen naik menjadi P_c . Efisiensi ekonomi dari produsen yang hilang sebesar $B-E-A$ dan efisiensi konsumen yang hilang sebesar $B-C-A$.

Gambar 2.3 (b) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan subsidi terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input non tradable berada pada P_d dan Q_2 . Subsidi terhadap input non tradable menyebabkan harga yang diterima produsen menjadi lebih tinggi (P_p), sedangkan harga yang dibayarkan konsumen menjadi lebih rendah (P_c). Efisiensi yang hilang dari produsen sebesar $A-C-B$ dan dari konsumen sebesar $A-B-E$.

2.1.5.6. Kebijakan Pertanian Terhadap *Output*

Kebijakan terhadap output dapat berupa subsidi maupun hambatan perdagangan diterapkan pada produsen yang mendatangkan produk substitusi impor. Kebijakan ini dikenakan pada komoditas pertanian yang masih impor seperti padi dan jagung. Pengenaan tarif atau pajak impor (bea masuk) bertujuan agar volume impor berkurang atau menambah biaya impor sehingga harga jual di dalam negeri menjadi lebih tinggi. Dengan harga komoditas padi dan jagung yang tinggi, produksi domestik dapat lebih bersaing dan petani lokal menerima pendapatan lebih tinggi dari usahatannya. Namun dampak negatifnya konsumen harus membayar lebih mahal untuk kedua komoditas tadi. Nopirin (1990) menambahkan bahwa pemberlakuan tarif impor nantinya juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui biaya atas bea masuk barang impor tersebut.



Sumber : Salvatore (1997) (dalam Suryana dan Agustian, 2014)

Gambar 2.4

Kurva Dampak Tarif Impor

Mengacu pada teori Salvatore (1997) dan teori impor menurut Krugman dan Obstfield (2002), (dalam Suryana dan Agustian, 2014) menerangkan bahwa seperti pada gambar 2.4 yaitu pada saat harga P_0 keseimbangan berada di titik e dimana perekonomian dalam kondisi autarki, tidak ada ekspor dan impor serta jumlah konsumsi sama dengan jumlah produksi. Pada saat harga P_w , perekonomian dalam kondisi *free trade* dimana produksi sebesar $0Q_1$ dan konsumsi sama dengan $0Q_2$ sehingga permintaan impor sebesar Q_1Q_2 . Terhadap permintaan impor pemerintah memberlakukan tarif sehingga harga naik menjadi P_t . Besarnya tarif impor adalah P_tP_w sehingga produksi meningkat menjadi $0Q_3$, konsumsi menurun menjadi $0Q_4$, dan permintaan impor berkurang menjadi Q_3Q_4 .

Dengan adanya pemberlakuan tarif ini, konsumen dirugikan karena harus menerima harga suatu komoditas lebih tinggi daripada harga sebelum tarif. Di lain pihak, pemerintah memperoleh pendapatan sebesar tarif impor dikalikan dengan

jumlah kuantitas impor setelah tarif ditetapkan, yakni sebesar **fgkj** dan pendapatan tambahan yang diterima oleh produsen dalam negeri sebesar $PwPt-fh$ sehingga kerugian bersih masyarakat (*dead weight loss*) akibat adanya pemberlakuan tarif tersebut sebesar $(hfg + jki)$, dengan rincian hfg merupakan kehilangan produsen (*producer loss*) dan jki merupakan kehilangan konsumen (*consumer loss*).

Kebijakan hambatan perdagangan berupa kuota juga diterapkan pada output atau komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Menurut Kindleberger dan Lindert (dalam Hardono dkk, 2004) kuota merupakan hambatan non tarif yang banyak digunakan untuk membatasi masuknya impor barang dan jasa. Pemberlakuan kuota impor pada umumnya dilakukan dengan alasan sebagai jaminan kemungkinan kenaikan pengeluaran impor akibat persaingan perdagangan luar negeri yang makin buruk. Selain itu penerapan kuota juga memberikan kekuatan dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah.

2.1.6. Input – Output dalam Usahatani

Dalam teori produksi, seorang pengusaha atau produsen memilih dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu, seefisien mungkin. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat berjalan efisien dan hasil produksi yang didapat menjadi optimal. (Suherman, 2001:56).

Dalam proses produksi, perusahaan mengubah input yang juga disebut faktor produksi termasuk segala sesuatunya yang harus digunakan perusahaan

sebagai bagian dari proses produksi menjadi output. Misalnya, dalam proses kegiatan produksi usahatani tanaman pangan, maka faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk pertanian yaitu lahan/tanah, sarana produksi pertanian (benih, pupuk, obat, saluran irigasi), modal dan tenaga kerja.

2.1.6.1. Lahan/Tanah

Tanah atau lahan merupakan faktor produksi utama usahatani yang mempunyai kontribusi besar dalam menghasilkan produk-produk pertanian. Besar kecilnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan (Mubyarto dalam Miftachuddin, 2014).

Tanah juga berpengaruh terhadap pendapatan usahatani. Faktor-faktor tanah yang berpengaruh terhadap pendapatan usahatani adalah luas lahan garapan, kondisi fisik, fragmentasi tanah, lokasi tanah dari pusat perekonomian, serta status penguasaan tanah. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap atau ditanami), maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. (Rahim dan Diah, 2008).

2.1.6.2. Modal

Modal adalah barang atau uang yang secara bersama dengan faktor produksi lain seperti tanah dan tenaga kerja menghasilkan produk baru dalam hal ini produk pertanian. (Hernanto, 1988:23). Soekartawi (1989:19) menambahkan modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Dengan demikian pembentukan

modal mempunyai tujuan yaitu untuk menunjang pembentukan modal lebih lanjut, meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani.

Menurut Rahim dan Diah (2008) modal dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu modal tetap (*fixed cost*) dan modal tidak tetap (*variable cost*). Modal tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian dimana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi. Sedangkan modal tidak tetap dapat berupa benih, pupuk, obat-obatan, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

Sumber modal dalam usahatani berasal dari petani itu sendiri atau dari pinjaman. Besar kecilnya modal yang dipakai ditentukan oleh besar kecilnya skala usaha yang dilakukan. Selain itu beraneka ragam komoditas yang dihasilkan dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar kecilnya modal yang digunakan. (Rahim dan Diah, 2008). Sumber modal lain dalam bentuk pinjaman biasanya diwujudkan dalam bentuk kredit usahatani. Kredit usahatani ini berfungsi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan pertanian, karena tanpa adanya kredit, pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian akan berjalan lambat. Untuk produksi yang lebih baik, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk memperoleh sarana produksi sehingga produktivitas produksi pertanian akan semakin meningkat. Maka dari itu peran kredit usahatani sangat penting mengingat petani di Indonesia rata-rata tidak mempunyai modal yang besar. (Soekartawi, 1989).

2.1.6.3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usahatani menggunakan tenaga mekanik dan manusia. Dimana tenaga kerja manusia dapat diperoleh dari dalam keluarga dan dari luar keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga adalah jumlah tenaga potensial yang tersedia dalam keluarga, sedangkan tenaga kerja dari luar diperoleh dengan cara sistem upah yaitu tergantung harga dari tiap-tiap daerah. Tenaga kerja dibagi lagi menjadi tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan, serta tenaga kerja anak-anak. Batasan tenaga kerja anak-anak adalah berumur 14 tahun ke bawah (Hernanto, 1988:25).

Ukuran tenaga kerja dihitung berdasarkan besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam Hari Orang Kerja (HOK) (Rahim dan Diah, 2008). Satuan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung besarnya tenaga kerja adalah HOK atau sama dengan satu hari kerja pria (HKP), yaitu jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk seluruh proses produksi yang diukur dengan ukuran kerja pria. Untuk menyetarakan, dilakukan konversi berdasarkan upah di tiap-tiap daerah. Hasil konversinya adalah satu hari pria dinilai sebagai satu hari kerja pria (HKP) dengan delapan jam kerja efektif per hari.

2.1.6.4. Sarana Produksi Pertanian

Penggunaan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) tak kalah pentingnya digunakan dalam proses produksi usahatani disamping penggunaan lahan, modal, dan tenaga kerja. Saprotan terdiri dari Benih/bibit unggul, Pupuk, obat-obatan

(Pestisida, fungisida, dll), dan Air (irigasi). Penggunaan saprota yang optimal akan meningkatkan produksi sistem usahatani baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.1.6.5. Output

Output dari kegiatan usahatani adalah komoditas pertanian, dalam hal ini komoditas padi dan jagung, dimana padi dihitung dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung dalam bentuk pipilan kering.

2.1.7. Policy Analysis Matrix (PAM)

Policy Analysis Matrix (PAM) digunakan untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik sistem usahatani ditinjau dari sudut usaha swasta (*private profit*) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau keuntungan sosial (*social profit*). (Aprizal, 2013)

Pearson dkk. (2005:22) menjelaskan hasil analisis PAM dapat menunjukkan pengaruh individual maupun kolektif dari kebijakan harga dan kebijakan faktor domestik. PAM juga memberikan dasar (*base line information*) yang penting bagi *benefit-cost analysis* untuk kegiatan investasi di sektor pertanian.

2.1.7.1. Tujuan Analisis PAM

Tujuan utama dari analisis PAM adalah memberikan informasi dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam menelaah ketiga isu sentral analisis kebijakan pertanian. Isu pertama berkaitan dengan daya saing usahatani pada tingkat harga dan teknologi yang ada. Isu kedua ialah dampak investasi publik, dalam bentuk pembangunan infrastruktur baru terhadap tingkat efisiensi

sistem usahatani. Efisiensi diukur dengan tingkat keuntungan sosial (*social profitability*). Isu ketiga berkaitan dengan dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani.

2.1.7.2. Identitas dalam Matriks PAM

Policy Analysis Matrix pada dasarnya mempunyai dua identitas yaitu tingkat keuntungan (*profitability identity*), dan identitas penyimpangan (*divergences identity*).

Tabel 2.1
Identitas Matriks dalam PAM

	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Faktor Domestik	
Privat	A	B	C	D
Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Pearson dkk (2005:30)

Keterangan :

Baris harga Privat

A = harga output x produksi; B = Biaya privat input tradable; C = Biaya privat input faktor domestik; D = A – (B + C) (keuntungan privat)

Baris harga sosial :

E = harga output sosial x produksi; F = biaya sosial input tradable; G = biaya sosial input faktor domestik; H = E – (F + G) (keuntungan sosial)

Baris efek divergensi :

$I = A - E$ (output transfer); $J = B - F$ (input tradable transfer); $K = C - G$ (Faktor domestik transfer); $L = I - (J + K)$ atau $D - H$ (transfer bersih)

2.1.7.2.1. Identitas Keuntungan (*profitability identity*)

Identitas keuntungan pada sebuah tabel PAM adalah hubungan perhitungan lintas kolom dari matriks. Keuntungan didefinisikan sebagai pendapatan (*revenue*) dikurangi biaya (*cost*) termasuk didalamnya biaya *input tradable* dan faktor domestik. Keuntungan privat (*private profitability*) pada PAM adalah selisih dari pendapatan privat dengan biaya privat. Penghitungan keuntungan privat, dari budget usahatani dan pengolahan hasil, dilakukan untuk mengukur daya saing. Oleh sebab itu, salah satu dampak penting dari kebijakan pertanian dapat ditunjukkan oleh baris pertama PAM (Tabel 2.1). Selanjutnya untuk membandingkan sistem usahatani yang berbeda dihitung *Private Benefit Cost Ratio* (PBCR) untuk setiap sistem dan selanjutnya kedua rasio tersebut dibandingkan. Jadi PBCR adalah pendapatan privat dibagi dengan biaya privat atau $PBCR = A/(B+C)$. (Pearson dkk, 2005:25)

Pendapatan dan biaya pada tingkat harga sosial (simbol E,F, dan G) pada Tabel 2.1 didasarkan pada estimasi *the social opportunity cost* dari komoditas yang diproduksi dan input yang digunakan, dimana nilai efisiensi (*social opportunity cost*) dihitung berdasarkan jumlah devisa yang dihemat atau diperoleh saat melakukan kegiatan impor/ekspor komoditas tertentu. Dengan demikian keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan biaya sosial, dan ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi usahatani.

Harga sosial (harga efisiensi) untuk input dan output tradabel adalah harga internasional untuk barang yang sejenis (*comparable*) yang artinya harga impor untuk komoditas impor dan harga ekspor untuk komoditas ekspor. Sedangkan harga sosial untuk faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) juga diestimasi dengan prinsip *social opportunity cost*. Namun, karena faktor domestik tidak diperdagangkan secara internasional sehingga diestimasi melalui pengamatan lapangan atas pasar faktor domestik di lokasi penelitian.

Selanjutnya untuk membandingkan tingkat efisiensi komoditas yang berbeda dihitung *Social Benefit Cost Ratio* (SBCR) untuk setiap usahatani dan kemudian membandingkannya. SBCR adalah rasio antara pendapatan sosial dengan biaya sosial, atau $SBCR = E/(F+G)$.

2.1.7.2.2. Identitas Divergensi

Identitas divergensi adalah hubungan lintas baris dari matriks. Divergensi disebabkan oleh harga privat suatu komoditas dengan harga sosialnya. Divergensi meningkat, baik oleh pengaruh kebijakan distortif, yang menyebabkan harga privat berbeda dengan harga sosialnya atau karena kegagalan pasar menghasilkan harga efisiensi. Semua angka pada baris ketiga dari tabel PAM didefinisikan sebagai *effect of divergences* yang artinya selisih antara angka pada baris pertama yaitu harga privat dengan baris kedua yaitu harga sosial. (Pearson dkk, 2005:29).

Salah satu penyebab terjadinya divergensi adalah kegagalan pasar (*market failure*). Pasar dikatakan gagal apabila tidak mampu menciptakan harga yang kompetitif. Ada tiga jenis kegagalan pasar yang menyebabkan divergensi. Pertama

monopoli (penjual menguasai pasar) atau monopsoni (pembeli menguasai pasar). Kedua eksternalitas negatif (biaya, dimana pihak yang menimbulkan terjadinya biaya tersebut tidak bisa dibebani biaya yang ditimbulkannya) atau eksternalitas positif (manfaat, dimana pihak yang menimbulkan manfaat tersebut tidak bisa menerima kompensasi atas manfaat yang ditimbulkannya). Ketiga pasar faktor domestik yang tidak sempurna.

Penyebab kedua terjadinya divergensi adalah kebijakan pemerintah yang distortif, dimana kebijakan distortif diterapkan untuk mencapai tujuan yang bersifat “non-efisiensi” (yaitu pemerataan dan ketahanan pangan). Kebijakan ini akan menghambat terjadinya alokasi sumberdaya yang efisien dan dengan sendirinya akan menimbulkan divergensi.

2.1.7.3. Analisis Sensitivitas

Menurut Monke dan Pearson (1989), analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan *input* atau *output* terhadap keseluruhan sistem di dalam usahatani. Analisis ini lebih lanjut dapat mengukur perubahan transfer *input*, transfer *output*, dan pengaruh kebijakan akibat perubahan variabel yang mempengaruhi biaya *input* atau penerimaan dari *output* usahatani.

Tujuan dilakukan analisis ini dalam suatu proyek adalah : 1) memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang akan dilakukan; 2) memperbaiki desain dari proyek; dan 3) mengurangi resiko kerugian dan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil (Pudjosumarto, 1998). Perbedaan suatu proyek atau perbedaan formulasi yang digunakan akan memberikan tingkat resiko dan manfaat

berbeda-beda pula. Suatu proyek dinyatakan sensitif terhadap empat masalah utama, yaitu : 1) harga; 2) kelambatan pelaksanaan; 3) kenaikan biaya; dan 4) hasil yang dicapai (Gittinger dan Hans, 1993).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Agustian dan Suryana (2014) tentang Analisis Daya saing Usahatani Jagung di Indonesia menunjukkan bahwa usahatani jagung di Indonesia secara umum menguntungkan, dengan keuntungan finansial sekitar Rp. 6,7 juta/ha dengan R/C rasio sebesar 1,73 dan secara ekonomi keuntungannya mencapai 8,7 juta/ha dengan R/C rasio sebesar 1,90. Usahatani jagung secara nasional juga memiliki daya saing kuat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien DRCR dan PCR masing-masing sebesar 0,48 dan 0,54. Dengan demikian, usahatani jagung efisien secara ekonomi dan finansial atau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan peningkatan produksi jagung yang komprehensif dan menerapkannya secara sinergis antar kelembagaan terkait, pencapaian swasembada jagung dalam waktu yang relatif singkat dapat diwujudkan, bahkan berpeluang untuk mengekspor.

Penelitian Aryanto dkk (2009) tentang Analisis Daya saing Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara dengan metode Policy Analysis Matriks menunjukkan bahwa profitabilitas privat dan sosial usahatani jagung berturut-turut Rp. 218.926 dan Rp. 3.045.938. PCR usahatani jagung sebesar 0,97. DRCR usahatani jagung sebesar 0,65. Berdasarkan hasil *Output Transfer* dan NPCO menunjukkan harga output di pasar domestik lebih

rendah dibanding pada pasar internasional. Berdasarkan hasil *Input Transfer* dan NPCI menunjukkan bahwa terdapat dampak kebijakan subsidi terhadap harga-harga input pada usahatani jagung. Hasil analisis *Faktor Transfer* menunjukkan bahwa terdapat dampak kebijakan pajak (retribusi) terhadap faktor-faktor domestik. Hasil EPC (0,80) menunjukkan rendahnya proteksi terhadap produk/output jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow, sementara hasil *Net Transfer* menunjukkan hasil yang negatif. *Profitability rates* usahatani jagung hanya sebesar 7% pada tingkat harga privat, sementara *Subsidy Ratio to Producers* hasilnya negatif. Hal ini menunjukkan terdapat tingkat anggaran operasional yang besar dalam produksi usahatani jagung, khususnya pada faktor privat. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa skenario ke 9 (harga pupuk turun 10% dan harga output naik 30%) merupakan skenario terbaik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa usahatani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow masih memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dianggap masih mampu membiayai input domestiknya, walaupun memiliki kecenderungan menurun jika tidak diimbangi dengan harga jual produk yang memadai sedangkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk usahatani jagung masih belum menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan para petani kecil dan kelangsungan usahatannya. Hal ini berbeda dengan usahatani padi (beras) karena kebijakan perberasan bersifat nasional, *top down* dan instruksional sehingga memiliki konsistensi dalam penerapannya.

Penelitian Ni Luh Prima (2016) tentang Analisis Tingkat Keuntungan Usahatani Padi Sawah sebagai Dampak dari adanya Subsidi Pupuk Di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali menunjukkan bahwa tingkat keuntungan finansial usahatani

padi sawah pada musim kemarau di Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 5.625.704,23/ha dengan nilai PBCR = 1,40 sedangkan keuntungan finansial usahatani padi sawah pada musim penghujan sebesar Rp. 5.802.663,42/ha dengan nilai PBCR = 1,39. Keuntungan ekonomi usahatani padi sawah pada musim kemarau sebesar Rp. 3.052.706,47/ha dan musim penghujan Rp. 1.234.146/ha dengan nilai SBCR masing-masing 1,28 dan 1,08. Dampak kebijakan subsidi pupuk pada usahatani padi sawah di Kabupaten Tabanan adalah terjadi kebijakan pajak terhadap input tradable usahatani padi sawah pada musim kemarau. Hal ini ditunjukkan dengan divergensi input tradable sebesar Rp. 167.907,63. Dari hasil analisis mendalam diketahui bahwa pajak dari pemerintah tersebut diterima petani terhadap input tradable seperti pupuk ZA< NPK Phonska, pupuk organik dan pestisida. Sedangkan input tradable lainnya berupa benih, urea, dan SP-36 diterima petani sebagai subsidi. Sebaliknya divergensi input tradable pada musim penghujan sebesar – Rp. 88.217,63 (negatif), menunjukkan adanya kebijakan subsidi. Hal ini berarti bahwa usahatani padi dan sawah pada musim penghujan di Kabupaten Tabanan bali menerima subsidi input. Subsidi input dari pemerintah yang diterima petani pada usahatani padi sawah pada musim penghujan adalah benih, pupuk Urea, dan SP-36.

Penelitian oleh Wan Abbas Zakaria, dkk (dalam Pearson, 2005:161) dengan judul *“The Impact of Irrigation Development on rice Production in Lampung Province”* mengemukakan bahwa sistem usahatani padi di propinsi Lampung kompetitif, baik pada musim hujan (MH) maupun musim kemarau (MK). Ternyata, di lahan irigasi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding tadah hujan.

Keuntungan sosial untuk manajemen dan lahan (*social return to management and land*) sistem usahatani pada lahan irigasi, sekitar separuh dari pendapatan sosialnya. Hal yang sama untuk usahatani tadah hujan, pada MH sekitar sepertiga. Sedangkan pada MK, karena pengaruh kekeringan menjadi negatif. Tetapi tingkat efisiensi usahatani tidak bisa diketahui kecuali nilai sosial dan lahan yang digunakan untuk menanam padi pada tingkat curah hujan normal bisa dihitung. Pengembangan infrastruktur irigasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing (*competitiveness*) usahatani padi. Kesimpulan yang tegas tidak bisa diambil dari hasil studi ini. Apakah investasi publik dalam bentuk pengembangan irigasi di Propinsi Lampung ini efisien? Analisis *Benefit-Cost* dari investasi irigasi memerlukan estimasi *social opportunity cost of land* yang digunakan untuk usahatani padi pada cuaca yang normal, serta informasi tentang biaya investasi dan pemeliharaan dari pengembangan infrastruktur irigasi.

2.3. Kerangka Berpikir

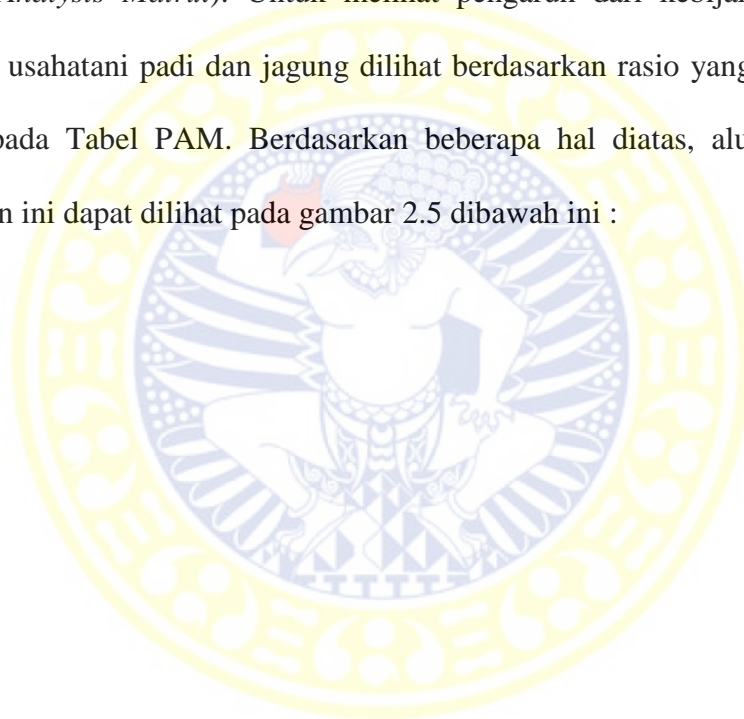
Komoditas pertanian merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional, tak terkecuali komoditas padi dan jagung. Indonesia hingga saat ini masih mengimpor komoditas padi dan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini mengakibatkan Indonesia menerapkan kebijakan hambatan perdagangan untuk komoditas pertanian berupa tarif dan pajak impor serta kebijakan subsidi terhadap input pertanian. Kebijakan hambatan perdagangan dan subsidi ini akan mempengaruhi harga komoditas padi dan jagung di dalam negeri. Padahal di sisi lain, Indonesia juga memproduksi komoditas padi dan jagung seperti di Kabupaten Ponorogo. Adanya komoditas padi dan jagung impor di pasar yang

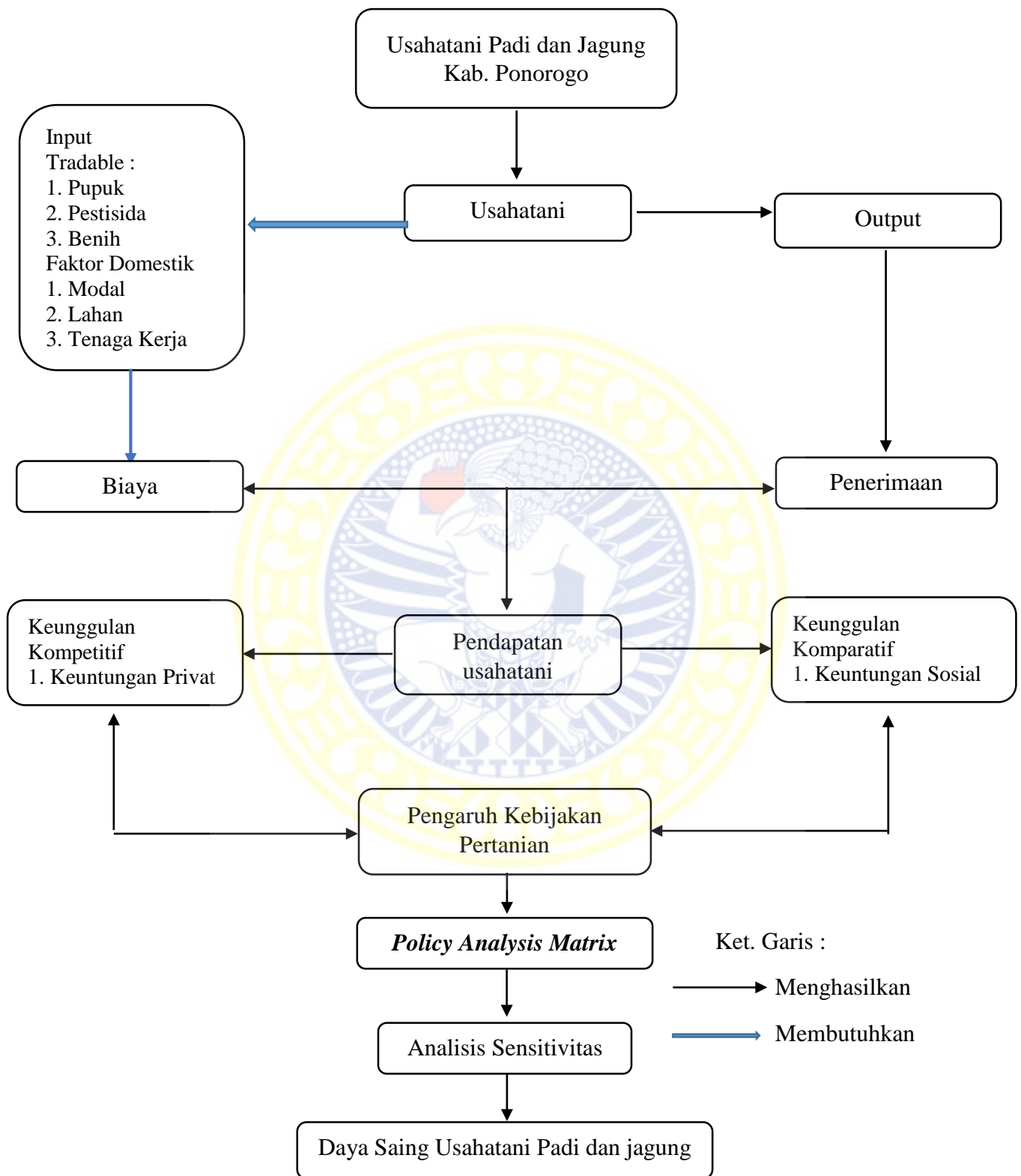
sama menyebabkan komoditas saling bersaing agar dapat bertahan dalam pasar dan diminati konsumen. Sementara itu, komoditas padi dan jagung di pasar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dikaji daya saing, profitabilitas, efisiensi dan kebijakan usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi usahatani (padi dan jagung) berdasarkan penggunaan biaya atas input dan pendapatan yang diterima berdasarkan hasil output yang dihasilkan dalam satuan Kg dikali dengan harga jualnya baik dalam harga sosial maupun harga privatnya. Harga sosial yaitu harga dimana input dan output *tradable* adalah berdasarkan harga internasional untuk barang yang sejenis (*comparable*) pada tingkat harga pedagang besar terdekat (dari lokasi petani). Harga internasional (*border price*) ditentukan dengan memperhitungkan nilai tukar, transportasi domestik, pengolahan, dan biaya marketing. Harga privat yaitu harga yang benar-benar dibayar produsen untuk faktor produksi dan harga yang benar-benar diterima dari hasil penjualan outputnya.

Keuntungan diperoleh atas pendapatan yang diterima dari usahatani dikurangi biaya yang dikeluarkan atas input yang digunakan. Daya saing dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional adalah berapa banyak biaya atas input yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi motif melakukan perdagangan bukan sekadar mutlak lebih produktif dalam menghasilkan barang atau jasa, tetapi lebih

kepada se efisien mungkin penggunaan biaya atas input yang digunakan. Keunggulan komparatif dihitung berdasarkan harga sosial Keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga privat dan nilai uang yang berlaku (resmi) atau berdasarkan analisis finansial. Semua hal yang disebutkan diatas yaitu pendapatan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh di analisis menggunakan alat analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*). Untuk melihat pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung dilihat berdasarkan rasio yang diperoleh dari olahan pada Tabel PAM. Berdasarkan beberapa hal diatas, alur berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini :





Gambar 2.5
Kerangka Pikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang menganalisis daya saing, profitabilitas, efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional untuk penelitian ini adalah :

1. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berdampak kepada usahatani dan pendapatan petani padi dan jagung, baik di tingkat nasional maupun sektoral.
2. Usahatani adalah suatu rangkaian aktivitas petani, baik secara individu maupun kelompok dalam menghasilkan satu atau lebih komoditas pertanian dengan cara menggunakan secara optimum input atau faktor produksi yang ada.
3. *Input* adalah semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, baik diawal produksi (pra panen) hingga pasca panen. Input dalam usahatani diantaranya:
 - a. Benih/bibit adalah penggunaan bibit selama proses produksi padi dan jagung dalam kilogram per satuan luas lahan. Ragam varietas dan berlabel atau tidak dalam penelitian ini diabaikan.

- b. Pupuk adalah penggunaan selama proses produksi usahatani dalam satuan kilogram per satuan luas lahan. Komposisi pupuk yang dianjurkan sesuai standar teknis dengan dosis yang belum mengacu pada analisis tanah, secara umum tidak membedakan status lahan baik sawah dengan irigasi teknis, semi teknis, maupun non teknis (ladang/tegal). Pupuk yang digunakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Anorganik (Urea, ZA, SP-36, dan KCI) dan Organik (Pupuk kandang/kompos).
- c. Pestisida adalah penggunaan pestisida selama proses produksi padi dan jagung, dibagi menjadi pestisida padat dan pestisida cair, masing-masing dalam satuan kilogram dan liter per satuan luas lahan.
- d. Tenaga kerja adalah pemakaian tenaga kerja dialokasikan sejak awal produksi (pra panen) hingga menjadi output (panen), dalam satuan orang.
- e. Tingkat upah didasarkan pada harian dan sistem borongan per satuan luas lahan dengan konversi standar upah yang berlaku untuk usahatani secara umum. Dinyatakan dalam satuan Hari Kerja Pria (HKP), Hari Kerja Wanita (HKW), Hari Kerja Ternak (HKT) dan Jam Kerja Mesin (JKM). Namun dalam struktur ongkos usahatani di Kabupaten ponorogo menggunakan Hari Orang Kerja (HOK) dalam satuan rupiah (Rp).
- f. Lahan adalah luasan lahan yang digarap oleh petani dan ditanami padi dan jagung dalam satuan hektar (ha).
- g. Modal kerja adalah biaya produksi (tunai) yang harus dibayar petani seperti pembelian input dan upah tenaga kerja dalam kurun satu kali masa produksi dalam satuan rupiah.

4. *Output* adalah padi dan jagung yang dihasilkan dalam usahatani padi dan jagung dalam satuan kg/ha.
5. Harga privat (harga pasar) merupakan harga yang secara aktual dikeluarkan dan diterima oleh petani di dalam proses produksi. Harga ini diperoleh dari *survey* pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tahun 2015.
6. Harga sosial (harga efisiensi) merupakan harga yang seharusnya dibayar oleh petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah pada masing-masing *input* maupun *output*. Harga sosial ini diperoleh dari perhitungan paritas impor dan *social opportunity cost* dalam satuan rupiah (Rp).
7. Harga sosial untuk input dan output *tradable* adalah harga internasional untuk barang yang sejenis (*comparable*) pada tingkat harga pedagang besar terdekat (dari lokasi petani). Harga internasional (*border price*) ditentukan dengan memperhitungkan nilai tukar, transportasi domestik, pengolahan, dan biaya marketing. Hasil perhitungan harga di tingkat petani disebut sebagai harga paritas impor atau ekspor (*import and export parity prices*) atau kadang-kadang disebut juga sebagai *border price equivalents*. Konsep umum perhitungan harga paritas ekspor/impor disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2

Tabel 3.1
Penentuan Harga Paritas Impor

Tahap	Harga Paritas Impor	
	Data	Proses
Harga Internasional (<i>International Prices</i>)	Harga f.o.b di negara pengekspor	
	Pengapalan (freight) ke negara pengimpor	
	Asuransi	
	Harga c.i.f di negara pengimpor	f.o.b + pengapalan (freight) + asuransi
Konversi mata uang (<i>currency conversion</i>)	Nilai Tukar (<i>exchange rate</i> , ER)	
	Premium nilai tukar (<i>exchange rate premium</i> , ERP)	
	Nilai tukar keseimbangan (<i>equilibrium exchange rate</i> , EER)	$ER \cdot (1 + ERP)$
	Harga c.i.f dalam mata uang domestik	$EER \cdot \text{c.i.f di negara pengimpor}$
Konversi berat (<i>weight conversion</i>)	Faktor konversi berat (<i>weight conversion factor</i>)	
	c.i.f dalam mata uang dan berat domestik	c.i.f dalam mata uang domestik/konversi berat
Distribusi dari pelabuhan ke pasar pedagang besar	Biaya transport dan marketing ke pasar perdagangan besar, dalam harga sosial	
	Nilai sebelum pengolahan	c.i.f dalam mata uang domestik dan berat+biaya distribusi
	Faktor konversi pengolahan	
	Harga paritas impor di pedagang besar	Nilai sebelum pengolahan*faktor konversi
Distribusi pedagang besar ke petani	Transport, marketing, penyimpanan, dalam harga sosial	
Hasil	Harga paritas impor di tingkat petani	Harga paritas impor tk ped. Besar +/- biaya dist. ke petani ((-) bila output; (+) bila input)

Sumber : Pearson, dkk (2005:336)

Tabel 3.2
Penentuan Harga Paritas Ekspor

Tahap	Harga Paritas Ekspor	
	Data	Proses
Harga Internasional (<i>International Prices</i>)	Harga c.i.f di negara pengimpor	
	Pengapalan (freight) ke negara pengekspor	
	Asuransi	
	Harga c.i.f di negara pengekspor	f.o.b + pengapalan (freight) + asuransi
Konversi mata uang (<i>currency conversion</i>)	Nilai Tukar (<i>exchange rate</i> , ER)	
	Premium nilai tukar (<i>exchange rate premium</i> , ERP)	
	Nilai tukar keseimbangan (<i>equilibrium exchange rate</i> , EER)	$ER \cdot (1 + ERP)$
	Harga c.i.f dalam mata uang domestik	$EER \cdot \text{f.o.b di negara pengimpor}$
Konversi berat (<i>weight conversion</i>)	Faktor konversi berat (<i>weight conversion factor</i>)	
	c.i.f dalam mata uang dan berat domestik	f.o.b dalam mata uang domestik/konversi berat
Distribusi dari pelabuhan ke pasar pedagang besar	Biaya transport dan marketing ke pasar perdagangan besar, dalam harga sosial	
	Nilai sebelum pengolahan	f.o.b dalam mata uang domestik dan berat+biaya distribusi
	Faktor konversi pengolahan	
	Harga paritas impor di pedagang besar	Nilai sebelum pengolahan*faktor konversi
Distribusi pedagang besar ke petani	Transport, marketing, penyimpanan, dalam harga sosial	
Hasil	Harga paritas impor di tingkat petani	Harga paritas ekspor tk pedagang besar – biaya distribusi ke petani

Sumber : Pearson, dkk (2005:336)

8. Harga sosial (harga efisiensi) faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) juga diestimasi dengan menggunakan *social oportunity cost*. Namun karena faktor domestik tidak diperdagangkan secara internasional dan tidak memiliki harga internasional, maka *social oportunity cost* nya diestimasi melalui pengamatan langsung pada wilayah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa pendapatan yang hilang karena faktor domestik digunakan untuk memproduksi komoditas tersebut dibandingkan dengan apabila digunakan untuk komoditas alternatif terbaiknya (Pearson dkk, 2005:27).
9. Nilai tukar rupiah adalah besarnya nilai tukar mata uang domestik (Rupiah) terhadap mata uang asing (Dollar), diasumsikan Rp. 13.394 per US\$.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder, diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang telah ada pada instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data berupa analisa usahatani yang di publikasikan oleh Instansi yang berwenang, instansi yang dimaksud diantaranya : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, serta pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Data diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Selain dari dokumen – dokumen yang disebutkan diatas, dokumentasi juga bisa didapat dari internet, artikel, dan juga literatur lainnya. Dari dokumen – dokumen tersebut

dilakukan analisis sementara yang merupakan bahan triangulasi untuk mencocokkan kesesuaian data yang diperoleh.

3.5. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui daya saing usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo adalah analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*). PAM banyak digunakan, khususnya untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan insentif intervensi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas, baik pada aktivitas usahatani, pengolahan maupun pemasaran. Dalam penelitian ini PAM menyusun matriks yang berisi informasi biaya, pendapatan, dan keuntungan privat serta sosial usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. Informasi biaya, pendapatan dan keuntungan privat serta sosial usahatani memberikan indikator daya saing usahatani yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam matriks PAM. Untuk lebih jelasnya matriks PAM dapat dilihat di Tabel 3.3

Tabel 3.3
Policy Analysis Matrix

	Pendapatan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Faktor Domestik	
Privat	A	B	C	$D = A - B - C$
Sosial	E	F	G	$H = E - F - G$
Efek Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = I - J - K = D - H$

Sumber : Pearson dkk (2005:33)

Di dalam tabel PAM memperlihatkan indikator profitabilitas, daya saing, efisiensi dan dampak kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang dianalisis adalah keuntungan privat dan keuntungan sosial. Indikator daya saing dan efisiensi usahatani yang dianalisis adalah keunggulan komparatif dan kompetitif. Indikator kebijakan pemerintah yang diterima usahatani dapat dianalisis melalui indikator kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input-output, dimana hal ini dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam matriks PAM. Indikator profitabilitas, daya saing, efisiensi, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo diantaranya :

3.5.1. Analisis keuntungan (*Profitabilitas*)

3.5.1.1 *Private Profitability* (PP)

$$D = A - B - C$$

Private Profitability (PP) atau keuntungan privat merupakan indikator daya saing (*competitiveness*) dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input, dan transfer kebijakan. Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditas alternatif yang lebih menguntungkan.

3.5.1.2 *Social Profitability* (SP)

$$H = E - F - G$$

Social Profitability (SP) atau keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi, baik akibat kebijaksanaan pemerintah maupun distorsi pasar. Apabila $H > 0$, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal dalam harga sosial dan mempunyai keunggulan komparatif.

3.5.2. Daya Saing dan Efisiensi

3.5.2.1 *Private Cost Ratio* (PCR)

$$PCR = \frac{C}{A-B}$$

Private Cost Ratio (PCR) yaitu rasio profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan sistem untuk membayar biaya domestik dan tetap kompetitif. Indikator PCR didapat dari biaya privat input *non tradabel* usahatani dibandingkan pendapatan privat dikurangi biaya input *tradabel* privat. Indikatornya adalah apabila $PCR < 1$ maka usahatani yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif, sebaliknya $PCR > 1$ maka usahatani yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif.

3.5.2.2 *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR)

$$DRCR = \frac{G}{E-F}$$

Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) yaitu rasio biaya faktor domestik dalam biaya oportunitas ekonominya (tenaga kerja, lahan, dan modal) terhadap nilai tambah, dihitung berdasarkan harga dunia untuk *output* maupun *input*. Dalam hal

ini DRCR digunakan sebagai *proxy* untuk perhitungan keuntungan sosial/ekonomis sebagai indikator derajat efisiensi. Jika $DRCR > 1$, berarti nilai sosial faktor domestik yang digunakan untuk memproduksi suatu komoditas melebihi nilai tambah sosialnya. Dengan kata lain sistem usahatani yang dilakukan tidak efisien. Namun apabila $DRCR < 1$, maka sistem usahatani mempunyai keunggulan komparatif karena nilai tambah yang dihasilkan melebihi biaya sumberdaya domestik yang digunakan.

3.5.2.3 R/C Ratio

$$\mathbf{R/C\ Ratio} = \frac{\mathbf{Total\ Revenue}}{\mathbf{Total\ Cost}}$$

R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu efisiensi usahatani, yaitu ukuran perbandingan antara Penerimaan usaha (Revenue = R) dengan Total Biaya (Cost = TC). Dengan nilai R/C, dapat diketahui apakah suatu usahatani menguntungkan atau tidak menguntungkan. Semakin besar nilai rasio R/C maka usahatani semakin efisien dan menguntungkan. $R/C\ Ratio > 1$, usahatani menguntungkan dan layak dikembangkan, $R/C\ Ratio < 1$, usahatani tidak menguntungkan dan tidak layak dikembangkan, $R/C\ Ratio = 1$, usahatani impas.

3.5.3. Dampak Kebijakan Pemerintah

3.5.3.1 Kebijakan Output

3.5.3.1.1 Transfer Output (TO)

$$\mathbf{TO = A - E}$$

Transfer Output (TO) yaitu selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga privat (aktual) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. jika nilai $TO > 0$ menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) ke produsen, demikian juga sebaliknya.

3.5.3.1.2 *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)*

$$NPCO = \frac{A}{E}$$

Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) yaitu rasio untuk mengukur *output transfer* dalam bentuk subsidi atau pengorbanan petani terhadap masyarakat dalam produksi atau sebaliknya, masyarakat terhadap produsen melalui harga yang dibayarkan. $NPCO > 1$ menunjukkan bahwa harga *output* domestik lebih tinggi dari harga impor (atau ekspor) dan berarti sistem usahatani menerima proteksi. Jika $NPCO < 1$, harga domestik lebih rendah dari harga dunia berarti harga domestik dis-proteksi. Namun jika $NPCO = 1$, berarti harga domestik sama dengan harga dunia sehingga dikatakan tidak ada *policy transfer*.

3.5.3.2 **Kebijakan Input**

3.5.3.2.1 *Transfer Input (TI)*

$$TI = B - F$$

Transfer Input (TI) yaitu selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga privat dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada

harga sosial. jika nilai $TI > 0$, menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen input *tradable*.

3.5.3.2.2 Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI)

$$NPCI = \frac{B}{F}$$

Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) yaitu rasio ini membandingkan harga domestik *input tradable* dengan harga sosialnya dan digunakan untuk mengukur tingkat proteksi pemerintah terhadap harga *input tradable*. $NPCI > 1$ menunjukkan biaya input lebih mahal dari biaya input pada tingkat harga dunia, begitupun juga sebaliknya. Makin kecil nilai NPCI, berarti makin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap *input tradable* atau ada kebijakan subsidi *input tradable*. Dan semakin besar nilai NPCI menunjukkan sistem usahatani dibebani pajak oleh kebijakan yang ada.

3.5.3.2.3 Transfer Factor (TF)

$$TF = C - G$$

Transfer Factor (TF) yaitu nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosial yang diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan. Nilai $TF > 0$, berarti ada transfer dari petani produsen kepada produsen input *non tradable*, demikian pula sebaliknya.

3.5.3.3 Kebijakan Input – Output

3.5.3.3.1 Net Transfer (NT)

$$NT = D - H$$

Net Transfer (NT) yaitu selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen (privat) dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input-output, demikian pula sebaliknya.

3.5.3.3.2 *Effective Protection Coefficient* (EPC)

$$EPC = \frac{A-B}{E-F}$$

Effective Protection Coefficient (EPC) yaitu perbandingan nilai tambah menurut perhitungan secara privat dengan nilai tambah menurut harga sosial. Pengukuran ini bertolak dari perhitungan proteksi *output* sebagai proporsi kelebihan harga jual yang diterima produsen dalam negeri setelah dipotong segala jenis pajak dibandingkan dengan hasil perkalian antara *border price* dan nilai tukar valuta asing. Dengan kata lain EPC merupakan indikator untuk melihat apakah proteksi pemerintah pada usahatani menjadi insentif atau dis-insentif bagi petani. Nilai $EPC > 1$, berarti proteksi pemerintah mampu memberi tambahan nilai pendapatan dibandingkan bila tanpa ada kebijakan. Semakin tinggi nilai EPC, semakin tinggi pula tingkat proteksi yang diperlukan. Nilai $EPC < 1$, menunjukkan bahwa proteksi pemerintah justru menjadi dis-insentif yang membebani petani.

3.5.3.3.3 *Profitability Coefficient* (PC)

$$PC = \frac{D}{H}$$

Profitability Coefficient (PC) yaitu rasio keuntungan bersih pada harga privat terhadap keuntungan bersih pada harga sosial. rasio ini digunakan untuk mengukur dampak dari seluruh transfer atas keuntungan privat, sama dengan rasio antara keuntungan privat terhadap keuntungan sosial. Jika $PC > 1$, maka adanya kebijakan mampu meningkatkan pendapatan sistem usahatani. Jika $PC = 1$, kebijakan tidak berpengaruh terhadap pendapatan sistem usahatani. Jika $PC < 1$, berarti kebijakan tidak dapat meningkatkan atau justru menurunkan pendapatan sistem usahatani tersebut.

3.5.3.3.4 *Subsidy Ratio to Producers* (SRP)

$$SRP = \frac{L}{E}$$

Subsidy Ratio to Producers (SRP) yaitu rasio untuk mengukur transfer bersih subsidi kepada produsen (petani). Selain itu, SRP juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya tarif *output* yang diperlukan untuk mempertahankan keuntungan usahatani jika distorsi kebijakan dan kegagalan pasar dihapuskan. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan besarnya insentif/dis-insentif yang diterima oleh sistem usahatani. Nilai SRP bertanda negatif secara umum dapat diartikan bahwa distorsi kebijakan telah menurunkan penerimaan dari sistem usahatni, begitupun sebaliknya.

3.5.4 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis untuk menguji secara sistematis apa yang terjadi pada kapasitas penerimaan suatu proyek apabila terdapat

kejadian-kejadian yang berbeda dengan perkiraan-perkiraan yang dibuat di dalam perencanaan. Suatu analisis kepekaan dikerjakan dengan mengubah suatu unsur atau mengkombinasikan unsur-unsur, kemudian menentukan pengaruh dari perubahan tersebut pada hasil analisis. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi di masa datang yang dapat merubah rasio-rasio dalam PAM. Namun kemungkinan tersebut sangat banyak maka analisis kepekaan dibatasi hanya terhadap kemungkinan perubahan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil analisis, khususnya pada usahatani padi dan jagung.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Gambaran Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo

Luas Kabupaten Ponorogo di tahun 2015 sekitar 137.178 km² yang terdiri dari lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan masing-masing luas sebesar 34.801 km² dan 89.182 km². Sedangkan lahan bukan pertanian di gambarkan dengan lahan pekarangan dan bangunan dengan luas sebesar 13.195 km². Kecamatan dengan luas lahan sawah terluas terletak di kecamatan Sukorejo dengan luas lahan sebesar 3.396 km² sedangkan kecamatan dengan luas lahan bukan sawah terluas terletak di kecamatan Ngrayun dengan luas lahan sebesar 16.568 km². (Tabel 1, Lampiran)

Kabupaten Ponorogo terletak di dataran rendah dan pegunungan, memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan Kabupaten Ponorogo menjadi tempat yang pas dan cocok dijadikan daerah penghasil produk unggulan tanaman pangan terutama komoditas padi dan jagung sehingga berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian.

Produksi padi (sawah dan ladang) pada tahun 2015 sebesar 4.658.538 kuintal, rata-rata produksi 64,21 kw/ha dengan luas panen 72.549 hektar. Produksi padi di tahun 2015 ini meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan di tahun 2015 ini produksi padi di Kabupaten Ponorogo mencapai titik

tertingginya dalam lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2011 – 2015. Produksi padi ini dihasilkan hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan potensi terbesar berada di kecamatan Pulung dengan produksi sebesar 367.016 kuintal dengan luas panen 5.684 hektar. (Tabel 1, Lampiran)

Sedangkan untuk produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 2.420.432 kuintal, rata-rata produksi 68,21 kw/ha dengan luas panen 35.485 hektar. Produksi jagung ini dihasilkan hampir di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo dengan potensi terbesar berada di kecamatan Sawoo dengan produksi sebesar 465.806 kuintal dengan luas panen 6.829 hektar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2011 – 2015, produksi jagung di Kabupaten Ponorogo bergerak secara fluktuatif dengan produksi tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 2.565.397 dengan luas areal garapan 35.690 hektar. (Tabel 1, Lampiran) , selain itu Kabupaten Ponorogo juga menghasilkan tanaman pangan selain padi dan jagung, yaitu ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

4.1.2. Gambaran Input – Output Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo

A. Benih/Bibit

Benih atau bibit dalam usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo sudah dapat disediakan dari sumber domestik. Di kalangan petani, banyak menggunakan benih berlabel atau bermerek yang berasal dari usaha pembenihan. Benih untuk usahatani padi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebagian besar menggunakan varietas Ciherang dengan volume 35 kg/ha. Hal ini dikarenakan padi

varietas ciherang memiliki keunggulan dibanding varietas lainnya seperti umur tanam yang hanya 116-125 hari, jumlah anakan produktifnya bisa mencapai 14-17 batang, lebih tahan lama, dan rasa nasinya punel. Sedangkan untuk usahatani jagung menggunakan varietas Bisi-2 dan Bisi-18 dengan volume 25 kg/ha. Varietas Bisi-2 dan Bisi-18 banyak ditanam oleh sebagian besar petani jagung di Kabupaten Ponorogo dikarenakan kemampuan genetik varietas dalam menghasilkan 2 tongkol jagung yang sama besar dalam satu tanaman. Selain itu kualitas hasil jagung dari varietas ini sangat baik dengan kadar air panen yang cukup rendah, menyebabkan susutnya berat biji setelah proses pengeringan sangat kecil. Kadar air panen yang rendah ini membuat jagung varietas ini dapat bertahan lama apabila disimpan dan tidak mudah berjamur. (Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, 2015)

B. Pupuk

Pupuk merupakan salah satu input dalam melakukan usahatani. Pada umumnya, pupuk yang digunakan oleh petani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo adalah pupuk Urea, ZA, SP, dan pupuk organik seperti Bokhasi (padi) dan Petroganik (jagung), serta merek Phonska (salah satu produk dari PT Petrokimia Gresik) yang digunakan oleh kebanyakan petani di Jawa Timur, dengan penggunaan atau takaran kombinasi dengan pupuk lainnya (Urea, ZA, SP) yang telah ditentukan, meskipun terbuka kemungkinan pemakaiannya tidak sesuai dosis. Penggunaan rata-rata pupuk untuk produksi padi tiap hektarnya adalah pupuk urea sebesar 200 kg, pupuk phonska 300 kg, dan pupuk organik bokhasi sebesar 1000 kg. Sedangkan penggunaan rata-rata pupuk untuk produksi jagung tiap hektarnya adalah pupuk urea 400 kg, pupuk ZA 400 kg, pupuk SP 400 kg, pupuk phonska 400

kg, dan pupuk organik petrogranik sebesar 1000 kg. Pupuk yang diimpor oleh pemerintah adalah Urea, SP, dan KCI. Perhitungan harga paritas impor pupuk dapat dilihat di Tabel 2 (Lampiran)

C. Tenaga kerja

Tenaga kerja dalam usahatani padi dan jagung dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja luar (upahan) dan dalam keluarga. Sedangkan berdasarkan sumbernya dibedakan antara pria, wanita, ternak, dan tenaga kerja mesin (*tractor power thresher*). Selain pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan per orang atau beberapa orang, saat ini banyak dijumpai sistem kerja borongan karena dinilai efisien bagi pemilik usahatani. Perhitungan untuk jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali produksi usahatani berbeda-beda tergantung luas lahan garapan/produksi. Tabel 4.1 menjelaskan perhitungan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam sistem usahatani dengan luas lahan garapan/produksi sebesar 1 hektar.

Tabel 4.1
Jumlah Rata-rata Tenaga Kerja dalam Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo

Tenaga Kerja (orang/hari) per hektar	Jumlah	
	Padi	Jagung
Olah Lahan	Borongan	30
Persemaian	4	-
Cabut Bibit	14	-
Tanam	Borongan	30
Penyiangan	14	30
Pemupukan	12	8
Pengendalian OPT	6	-
Panen	Borongan	-
Perontok	-	Borongan

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

D. Modal

Untuk membiayai usahatani padi dan jagung diperlukan sumber modal. Sumber modal bisa berasal dari tabungan keluarga, lembaga perkreditan formal, dan sumber lainnya. Sumber modal yang bukan dari tabungan keluarga seperti lembaga perkreditan misalnya memberikan bunga modal yang harus dibayar.

Biaya modal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu modal kerja dan modal investasi. Modal kerja adalah biaya produksi (*tunai*) yang harus dibayar petani seperti pembelian *input*, upah tenaga kerja, dan penyimpanan dalam kurun waktu satu tahun produksi. Modal investasi adalah pengeluaran atas aset yang memberikan kegunaan (*productive services*) lebih dari satu tahun. Pada modal investasi, biaya terjadi dalam satu (atau beberapa) tahun, tetapi pendapatan (*benefit*) diterima untuk suatu periode panjang.

E. Lahan

Lahan merupakan *input non tradable* penting dalam usahatani padi dan jagung. Penggunaan lahan untuk padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo dibedakan berdasarkan jenis pengairannya, yaitu : teknis, setengah teknis, sederhana, desa/non-PU, tadah hujan, dan pasang surut. Masing-masing jenis tersebut berbeda lokasi dan tingkat produktivitas atau kualitas lahan dalam menghasilkan berbagai macam produk pertanian dan akhirnya mempengaruhi nilai sewanya.

F. Pestisida

Pada usahatani padi di Kabupaten Ponorogo, penggunaan pestisida dibedakan menjadi dua, yaitu pestisida cair dan padat. Penggunaan pestisida terdapat pada usahatani padi dimana penggunaan pestisida padat Reagen per hektar sebesar 14 kg dan penggunaan pestisida cair Vertilisium per hektar sebesar 10 liter. Penggunaan pestisida yang digunakan dalam satu kali produksi komoditas padi berbeda-beda tergantung luas lahan garapan/produksi. Sedangkan untuk produksi komoditas jagung tidak menggunakan pestisida baik padat maupun cair.

G. Output

Output dari kegiatan usahatani padi dan jagung adalah padi dalam bentuk GKG (Gabah Kering Giling) dan jagung dalam bentuk pipilan kering. Hasil produksi per hektar usahatani padi di Kabupaten Ponorogo sebesar 7200 kg sedangkan usahatani jagung sebesar 9000 kg.

4.1.3. Gambaran Harga Input – Output Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo

A. Benih

Benih untuk usahatani padi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebagian besar menggunakan varietas Ciherang dengan harga Rp. 12.000/kg sedangkan untuk usahatani jagung menggunakan varietas Bisi-2 dan Bisi-18 dengan harga Rp. 65.000/kg. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo membuktikan bahwa untuk harga benih varietas Ciherang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (sejak tahun 2011) meningkat sebesar 16% dari harga di tahun 2011 sebesar Rp.10.000/kg

sedangkan untuk harga benih jagung yaitu Bisi-2 dan Bisi-18 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau 2011 - 2015 cenderung meningkat sebesar 3 % atau 3000 rupiah/kg dari harga di tahun 2011 sebesar Rp. 62.000/kg. (Tabel 8, Lampiran)

B. Pupuk

Harga rata-rata pupuk di tahun 2015 (harga privat) untuk Urea Rp. 1.800/kg, ZA Rp. 1.400/kg, SP Rp. 2.000/kg, dan Phonska Rp. 2.300/kg. Harga ini sama dengan harga di tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya mengingat harga untuk input pupuk telah diterapkan kebijakan subsidi dari pemerintah. Kebijakan subsidi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.

Tabel 4.2.
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk	Harga	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
Urea	1.800	90.000 (@50 kg)
SP-36	2.000	100.000 (@50 kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 kg)
Organik	500	20.000 (@40 kg)

Sumber : Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015.

C. Tenaga kerja

Harga atau tingkat upah untuk setiap tenaga kerja dihitung berdasarkan Ongkos Harian. Ongkos harian per tenaga kerja untuk usahatani padi dan jagung rata-rata sebesar Rp. 60.000. Ongkos harian per tenaga kerja untuk usahatani di tahun 2015 ini meningkat dari tahun 2014 dimana per HOK dibayar sebesar Rp.

40.000 atau meningkat sebesar 30% dibanding tahun 2014. Sedangkan ongkos borongan berbeda antara produksi padi dan jagung dimana dalam produksi padi sistem ini terdapat pada proses olah lahan, tanam, dan panen dengan masing-masing sebesar Rp. 1.050.000 (olah lahan), Rp. 840.000 (tanam), dan panen Rp. 3.330.000 (panen) sedangkan dalam produksi jagung terdapat pada proses perontokan yaitu sebesar Rp. 900.000. Harga sosial untuk tenaga kerja diestimasi dengan prinsip *social opportunity cost*. Karena tidak diperdagangkan secara internasional, maka harga sosial tenaga kerja sama dengan harga privatnya yang dihitung berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo.

D. Modal

Penelitian ini menggunakan komponen bunga modal dengan menggunakan tingkat suku bunga kredit bank pemerintah (BRI) untuk modal kerja sebesar 9% per tahun atau 3% per musim (4 bulan) dari modal kerja yang dibutuhkan. Untuk estimasi harga sosial modal kerja menggunakan tingkat bunga Bank Indonesia pada tahun 2015 dengan perkiraan sekitar 17 % per tahun (ditambah tingkat inflasi) atau 5,6% persen per musim (4 bulan).

E. Lahan

Tahun 2015 harga sewa lahan untuk produksi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo bervariasi, antara Rp. 2.000.000 – Rp. 6.000.000 tergantung lokasi dan kualitas kandungan lahan.

F. Pestisida

Pada usahatani padi di Kabupaten Ponorogo, penggunaan pestisida dibedakan menjadi dua, yaitu pestisida cair dan padat. Tahun 2015 harga pestisida padat Reagen Rp. 8.500/kg dan harga pestisida cair Vertilisium Rp. 25.000/liter. Sedangkan untuk produksi komoditas jagung tidak menggunakan pestisida baik padat maupun cair.

G. Output

Perkembangan harga padi dan jagung terutama di Kabupaten Ponorogo sangat fluktuatif. Pada saat musim panen raya, harga relatif murah sedangkan saat musim paceklik harga relatif mahal. Pada tahun 2015, harga rata-rata padi di tingkat petani di Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar Rp. 4.300 atau naik 100 rupiah dibanding harga rata-rata di tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 4.200. Sedangkan harga rata-rata jagung di tingkat petani yaitu sebesar Rp. 3.100 atau naik 200 rupiah dibanding harga rata-rata di tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.900. (Tabel 9, Lampiran)

Untuk harga internasional padi/beras di Indonesia mengacu harga FOB beras dari negara Thailand dengan kadar pecah 25% sedangkan jagung mengacu harga FOB jagung kuning no. 2 yang berasal dari pelabuhan Gulf, US. Harga paritas impor beras dan jagung yang akan dijadikan harga sosial dapat dilihat pada Tabel 3 (Lampiran). Pada pasar internasional, padi diperdagangkan dalam bentuk beras sedangkan jagung dalam bentuk jagung tanpa olahan. Harga yang dipakai dalam paritas impor adalah harga c.i.f.

4.2. Hasil Analisis

4.2.1. Hasil *Policy Analysis Matrix* (PAM)

Perhitungan hasil pada tabel PAM berdasarkan hasil perhitungan pada tabel bujet privat dan bujet sosial. Untuk mengetahui bujet privat usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo di tahun 2015 dapat dilihat di Tabel 4 dan Tabel 5 (Lampiran). Sedangkan untuk mengetahui bujet sosial usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo di tahun 2015 dapat dilihat di Tabel 6 dan Tabel 7 (Lampiran).

Setelah data diperoleh dan diolah, selanjutnya data dikelompokkan menurut komponennya dan disusun dalam bentuk matriks. Penyusunan matriks yang terdiri dari bujet privat dan bujet sosial untuk setiap harga dari *input tradable*, harga faktor domestik, dan harga *output* dimana perbedaan kedua harga tersebut merupakan dampak kebijakan yang ditempuh pemerintah, serta distorsi di pasar *input* dan *output*.

Tabel 4.3

Hasil Perhitungan PAM (*Policy Analysis Matrix*) Usahatani Padi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Rp/Ha)

	Pendapatan	Biaya				Profit
		Input Tradable	Faktor Domestik			
			Tenaga Kerja	Modal	Lahan	
Privat	30.960.000 [A]	2.339.000 [B]	8.220.000 [C]	690.000 [D]	5.250.000 [E]	14.461.000 [F]
Sosial	29.385.745,92 [G]	2.790.294,4 [H]	8.220.000 [I]	768.000 [J]	4.500.000 [K]	13.107.451,5 [L]
Divergensi	1.574.254,08 [M]	-451.294,4 [N]	0 [O]	-78.000 [P]	750.000 [Q]	1.353.548,48 [R]

Sumber : Hasil perhitungan bujet privat dan bujet sosial, diolah

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan PAM (*Policy Analysis Matrix*) Usahatani Jagung di
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Rp/Ha)

	Pendapatan	Biaya				Profit
		Input Tradable	Faktor Domestik			
			Tenaga Kerja	Modal	Lahan	
Privat	27.900.000 [A]	5.125.000 [B]	5.800.000 [C]	390.000 [D]	2.000.000 [E]	14.585.000 [F]
Sosial	38.557.530 [G]	7.332.361,6 [H]	5.800.000 [I]	468.000 [J]	3.000.000 [K]	21.957.168,4 [L]
Divergensi	-10.657.530 [M]	-2.207.361,6 [N]	0 [O]	-78.000 [P]	-1.000.000 [Q]	-7.372.168,4 [R]

Sumber : Hasil perhitungan bujet privat dan bujet sosial, diolah

4.2.2. Keuntungan Privat

Angka-angka yang terdapat pada baris pertama dari Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berisi nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga privat (harga aktual yang terjadi di pasar). Adapun hasilnya adalah :

a. Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Pendapatan pada tingkat harga privat sebesar Rp. 30.960.000 (A). Nilai ini didapat dari total output yang dihasilkan yaitu sebesar 7200 kg dikalikan dengan harga output sebesar Rp. 4.300 per kg.
2. Biaya *input tradable* pada tingkat harga privat sebesar Rp. 2.339.000 (B). Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, pestisida, dan benih dikalikan dengan harga privatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 (Lampiran).

3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga privat masing-masing sebesar Rp. 8.220.000 (C), Rp. 690.000 (D), Rp. 5.250.000 (E). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga privatnya. Nilai lahan dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa tanam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 (Lampiran).
 4. Keuntungan privatnya sebesar Rp. 14.461.000 (F). Nilai ini didapat dari pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik.
- b. Usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo adalah :
1. Pendapatan pada tingkat harga privat sebesar Rp. 27.900.000 (A). Nilai ini didapat dari total output yang dihasilkan yaitu sebesar 9000 kg dikalikan dengan harga output sebesar Rp. 3.100 per kg.
 2. Biaya *input tradable* pada tingkat harga privat sebesar Rp. 5.125.000 (B). Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, pestisida, dan benih dikalikan dengan harga privatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 (Lampiran).
 3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga privat masing-masing sebesar Rp. 5.800.000 (C), Rp. 390.000 (D), Rp. 2.000.000 (E). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan

upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga privatnya. Nilai lahan dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa tanam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 (Lampiran).

4. Keuntungan privatnya sebesar Rp. 14.585.000 (F). Nilai ini didapat dari pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik.
- c. Nilai-nilai privat yang disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 merupakan hasil perhitungan dengan asumsi :
 - 1) Harga *input* pupuk urea yang digunakan sebesar Rp. 1.800
 - 2) Harga *input* pupuk TSP/SP yang digunakan sebesar Rp. 2000
 - 3) Harga *output* padi yang digunakan sebesar Rp. 4.300
 - 4) Harga *output* jagung yang digunakan sebesar Rp. 3.100
 - 5) Nilai sewa lahan pada harga privat untuk usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar Rp. 5.250.000 dan Rp. 2.000.000
 - 6) Suku bunga modal kerja yang digunakan adalah suku bunga kredit BRI sebesar 9% per tahun atau 3% per musim tanam.

4.2.3. Keuntungan Sosial

Angka-angka yang terdapat pada baris kedua dari Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berisi nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga sosial (harga yang akan menghasilkan alokasi terbaik dari sumber daya). Adapun hasilnya adalah :

a. Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Pendapatan pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 29.385.745 (G). Nilai ini didapat dari total output yang dihasilkan yaitu sebesar 7200 kg dikalikan dengan harga output sebesar Rp. 4.081,35 per kg.
2. Biaya *input tradable* pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 2.790.294 (H). Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, pestisida, dan benih dikalikan dengan harga sosialnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 (Lampiran).
3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga sosial masing-masing sebesar Rp. 8.220.000 (I), Rp. 768.000 (J), Rp. 4.500.000 (K). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga sosialnya. Nilai lahan dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa tanam dengan prinsip *social opportunity cost of land*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 (Lampiran).
4. Keuntungan sosialnya sebesar Rp. 13.107.451 (L). Nilai ini didapat dari pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik.

b. Untuk usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Pendapatan pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 38.557.530 (G). Nilai ini didapat dari total output yang dihasilkan yaitu sebesar 9000 kg dikalikan dengan harga output sebesar Rp. 4.284,17 per kg.
 2. Biaya *input tradable* pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 7.332.361 (H). Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, pestisida, dan benih dikalikan dengan harga sosialnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 (Lampiran).
 3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga sosial masing-masing sebesar Rp. 5.800.000 (I), Rp. 468.000 (J), Rp. 3.000.000 (K). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga sosialnya. Nilai lahan dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa tanam dengan prinsip *social opportunity cost of land*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 (Lampiran).
 4. Keuntungan sosialnya sebesar Rp. 21.957.168 (L). Nilai ini didapat dari pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik.
- c. Nilai-nilai sosial yang disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 merupakan hasil perhitungan dengan asumsi :
- 1) Harga *input* pupuk urea yang digunakan sebesar Rp. 4.056,47

- 2) Harga *input* pupuk TSP/SP yang digunakan sebesar Rp. 5.261,93
- 3) Harga *output* padi yang digunakan sebesar Rp. 4.081,35
- 4) Harga *output* jagung yang digunakan sebesar Rp. 4.284,17
- 5) Harga-harga input dan output di atas merupakan hasil perhitungan harga paritas impor pada Tabel 2 dan Tabel 3 (Lampiran)
- 6) Nilai sewa lahan pada harga sosial (*social opportunity cost of land*) untuk usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar Rp. 4.500.000 dan Rp. 3.000.000
- 7) Suku bunga modal kerja yang digunakan adalah suku bunga kredit BI sebesar 17% per tahun atau 5,6% per musim tanam.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Divergensi

Baris ketiga pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 disebut dengan baris *effect of divergences* (divergensi). Divergensi adalah selisih antara harga privat dengan harga sosial, terdiri dari divergensi pendapatan, divergensi biaya *input tradable*, dan divergensi biaya faktor domestik (tenaga kerja, modal, dan lahan). Adapun Hasilnya adalah :

- a. Untuk usahatani padi di Kabupaten Ponorogo ; tingkat divergensi pendapatan sebesar Rp. 1.574.254 (M); tingkat divergensi biaya *input tradable* sebesar Rp. -451.294 (N); tingkat divergensi biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan masing-masing sebesar Rp. 0 (O), Rp. -78.000 (P), Rp.

750.000 (Q); sedangkan *net transfer effects* dimana untuk mengukur dampak total dari seluruh divergensi sebesar Rp. 1.353.548 (R)

- b. Untuk usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo ; tingkat divergensi pendapatan sebesar Rp. -10.657.530 (M); tingkat divergensi biaya *input tradable* sebesar Rp. -2.207.361 (N); tingkat divergensi biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan masing-masing sebesar Rp. 0 (O), Rp. -78.000 (P), Rp. -1.000.000 (Q); sedangkan *net transfer effects* dimana untuk mengukur dampak total dari seluruh divergensi sebesar Rp. -7.372.168 (R).

Adapun uraian tentang divergensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- a. Divergensi pendapatan adalah selisih antara pendapatan privat dan pendapatan sosial. Nilai divergensi pada usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar Rp. 1.574.254 (M) dan Rp. -10.657.530 (M). Nilai divergensi yang negatif disebabkan karena harga sosial *output* (jagung) lebih besar daripada harga privatnya begitupun juga sebaliknya.
- b. Divergensi biaya adalah selisih antara biaya privat dan biaya sosial. Nilai divergensi biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya *input tradable* dan biaya faktor domestik (tenaga kerja, modal, dan lahan).
 - 1) Nilai divergensi pada biaya *input tradable* usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar Rp. -451.294 (N) dan Rp. -2.207.361 (N). Nilai negatif ini disebabkan karena harga sosial *input* berupa pupuk urea dan SP/TSP lebih mahal daripada harga privatnya.

- 2) Nilai divergensi pada biaya faktor domestik tenaga kerja pada usahatani padi dan jagung sama yaitu Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena harga sosial untuk tenaga kerja diestimasi dengan prinsip *social opportunity cost*, sehingga harga sosialnya sama dengan harga privatnya yang dihitung melalui pengamatan langsung di lapangan (lokasi penelitian).
 - 3) Nilai divergensi pada biaya faktor domestik modal pada usahatani padi dan jagung adalah sebesar Rp. -78.000. nilai negatif ini disebabkan karena tingkat bunga modal kerja berdasarkan harga sosial lebih tinggi (5,6% per musim) daripada tingkat bunga modal kerja berdasarkan harga privat (3% per musim).
 - 4) Nilai divergensi pada biaya faktor domestik lahan pada usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar Rp. 750.000 dan Rp. -1.000.000. Hal ini disebabkan karena harga sosial untuk lahan diestimasi dengan prinsip *social opportunity cost of land* dimana komoditas alternatif terbaik untuk ditanam di lahan sawah selain padi adalah kedelai dan komoditas alternatif untuk ditanam di lahan tegal selain jagung adalah ketela pohon.
- c. Transfer bersih atau *net transfer*
- 1) Untuk usahatani padi sebesar Rp. 1.353.548 (R) didapatkan dari Rp. 1.574.254 (M) – (Rp. -451.294) (N) – (0) (O) – (Rp. -78.000) (P) – (750.000) (Q) atau bisa didapatkan dari selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial yaitu Rp. 14.461.000 (F) – Rp. 13.107.451 (L)
 - 2) Untuk usahatani jagung sebesar Rp. -7.132.170 (R) didapatkan dari Rp. -10.657.530 (M) – (Rp. -2.207.361) (N) – (0) (O) – (Rp. -78.000) (P) – (Rp. -

1.000.000) (Q) atau bisa didapatkan dari selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial yaitu Rp. 14.585.000 (F) – Rp. 21.957.168 (L).

4.3.2. Analisis Rasio di dalam Tabel PAM

Tabel 4.5
Indikator Rasio Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

No	Indikator Rasio	Nilai	
		Padi	Jagung
1	<i>Private Cost Ratio</i> (PCR)	0,49	0,36
2	<i>Domestic Resource Cost Ratio</i> (DRCR)	0,51	0,30
3	<i>R/C Ratio</i> harga privat	1,88	2,10
4	<i>R/C Ratio</i> harga sosial	1,81	2,33
5	<i>Transfer Output</i> (TO)	1.574.254	-10.657.530
6	<i>Nominal Protection Coefficient on Output</i> (NPCO)	1,05	0,72
7	<i>Transfer Input</i> (TI)	-451.294	-2.207.361
8	<i>Nominal Protection Coefficient on Input</i> (NPCI)	0,84	0,70
9	<i>Transfer Factor</i> (TF)	672.000	-1.078.000
10	<i>Net Transfer</i> (NT)	1.353.548	-7.372.168
11	<i>Effective Protection Coefficient</i> (EPC)	1,08	0,73
12	<i>Profitability Coefficient</i> (PC)	1,10	0,67
13	<i>Subsidy Ratio to Producers</i> (SRP)	0,05	-0,19

Sumber : Hasil PAM, diolah

1. Indikator Daya Saing dan Efisiensi

Untuk melihat tingkat daya saing usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo tahun 2015 dapat diukur dengan rasio *Private Cost Ratio* (PCR) dan *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR). Berdasarkan hasil perhitungan indikator rasio pengukuran daya saing, nilai PCR untuk usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar 0,49 dan 0,36 ($PCR < 1$). Hal ini dapat diartikan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 **memiliki keunggulan kompetitif** atau daya saing pada harga privat. Nilai 0,49 dan 0,36 mempunyai arti bahwa untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah

output pada harga privat hanya membutuhkan sumber daya domestik masing-masing sebesar 49% dan 36%. Atau setiap satu satuan rupiah produksi yang dihasilkan akan memberikan nilai tambah secara finansial (harga privat) masing-masing sebesar 0,51 dan 0,64 rupiah.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator rasio pengukuran daya saing, nilai DRCR untuk usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar 0,51 dan 0,30 ($DRCR < 1$). Hal ini dapat diartikan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 **memiliki keunggulan komparatif** atau daya saing pada harga sosial. Nilai 0,51 dan 0,30 mempunyai arti bahwa untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah *output* pada harga sosial hanya membutuhkan sumber daya domestik masing-masing sebesar 51% dan 30%. Atau setiap satu satuan rupiah produksi yang dihasilkan akan memberikan nilai tambah secara ekonomis (harga sosial) masing-masing sebesar 0,49 dan 0,70 rupiah.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator rasio pengukuran efisiensi, rasio R/C untuk usahatani padi dan jagung pada harga privat masing-masing sebesar 1,88 dan 2,10 sedangkan rasio R/C untuk usahatani padi dan jagung pada harga sosial masing-masing sebesar 1,81 dan 2,32 ($R/C \text{ Ratio} > 1$). Hal ini dapat diartikan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 efisien dalam penggunaan biaya atas input untuk memperoleh pendapatan atas *output* yang dihasilkan dalam sistem usahatani. Soekartawi (2003) mengatakan bahwa efisien tidaknya usahatani ditentukan oleh besar kecilnya

hasil yang diperoleh dari usahatani tersebut serta besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil tersebut.

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi dan Jagung

Komoditas padi dan jagung merupakan komoditas strategis yang ketersediannya senantiasa dikelola pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut berkaitan dengan perdagangan internasional serta kebijakan makro ekonomi yang turut mempengaruhi daya saing komoditas pertanian. Kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi dan jagung tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2011 yang menetapkan impor beras sebesar Rp. 450/kg, sedangkan tarif impor jagung sebesar 5%. Kebijakan pemerintah terhadap input usahatani yaitu impor, PPn, dan subsidi. Tarif impor dan PPn untuk pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif impor 5% dan PPn sebesar 10% untuk pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan kebijakan subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015.

Kebijakan yang pemerintah lakukan baik terhadap komoditas maupun *input* usahatani dapat dilihat melalui indikator rasio yang dihitung berdasarkan komponen pada Tabel PAM, yaitu :

1. Kebijakan Output

Kebijakan Output adalah kebijakan terhadap komoditas yang dihasilkan yang mana di dalam penelitian ini adalah komoditas padi dan jagung. Berdasarkan Tabel 4.5 kebijakan output pada usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain :

a. *Transfer Output (TO)*

Transfer Output (TO) menunjukkan jumlah transfer yang diterima oleh usahatani maupun konsumen komoditas padi dan jagung. Nilai TO (*Transfer Output*) pada usahatani padi positif sebesar 1,57 juta rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer dari masyarakat (konsumen) kepada usahatani padi (produsen) sebesar 1,57 juta rupiah akibat perbedaan harga privat dengan harga sosial. Hal ini menyebabkan pendapatan aktual yang diperoleh usahatani lebih besar dibandingkan pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga padi yang diterima secara aktual oleh usahatani lebih tinggi daripada harga sosial yang seharusnya diterima sehingga mengakibatkan surplus konsumen menurun dan surplus usahatani padi meningkat. Kebijakan tarif impor beras sebesar Rp. 450/kg yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2011 menimbulkan subsidi secara implisit kepada usahatani padi di Kabupaten Ponorogo karena tarif impor menyebabkan harga beras lebih tinggi dibandingkan harga tanpa kebijakan. Disisi lain kebijakan pemerintah berkaitan dengan impor beras tidak berpihak kepada konsumen karena konsumen harus membayar lebih tinggi untuk membeli beras.

Nilai TO (*Transfer Output*) pada usahatani jagung negatif 10,67 juta rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer kepada masyarakat

(konsumen) sebesar 10,67 juta rupiah akibat perbedaan harga sosial dengan harga yang seharusnya diterima. Hal ini mengakibatkan pendapatan aktual usahatani lebih kecil dibandingkan pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga jagung yang diterima secara aktual oleh usahatani lebih rendah daripada harga sosial yang seharusnya diterima sehingga surplus usahatani jagung menurun dan surplus konsumen meningkat. Kebijakan yang diterapkan dalam impor jagung yaitu tarif impor jagung sebesar 5% belum mampu membuat harga jagung dalam negeri bersaing. Hal ini karena harga jagung lebih rendah dibandingkan harga tanpa kebijakan, sehingga petani menerima harga yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah.

b. *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)*

Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai NPCO > 1 yaitu sebesar 1,05 yang artinya bahwa kebijakan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani padi. Kebijakan tarif impor padi sebesar Rp. 450/kg yang ditetapkan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani padi sehingga nilai total output 5% lebih tinggi. Sedangkan untuk usahatani jagung memiliki nilai NPCO < 1 yaitu sebesar 0,72 yang artinya bahwa kebijakan tarif impor jagung belum mampu memproteksi. Kebijakan tarif impor jagung sebesar 5% yang ditetapkan pemerintah belum mampu memproteksi usahatani jagung sehingga nilai total output 72% lebih rendah.

2. Kebijakan Input

Kebijakan input merupakan kebijakan pemerintah terhadap input produksi pertanian seperti subsidi atau pajak yang dikenakan pada bahan baku usahatani.

Berdasarkan Tabel 4.5, kebijakan input pada usahatani padi dan jagung dapat dikaji melalui indikator rasio dalam PAM, antara lain :

a. *Transfer Input* (TI)

Transfer Input (TI) menunjukkan jumlah transfer kepada usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap *input tradable*. Nilai *Transfer Input* (TI) usahatani padi adalah negatif, artinya terdapat transfer kepada usahatani padi setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* sebesar Rp. 451.294. Hal ini terjadi karena usahatani padi di Kabupaten Ponorogo membayar biaya aktualnya lebih rendah dibandingkan biaya sosialnya. Sedangkan Nilai *Transfer Input* (TI) usahatani jagung juga bernilai negatif, artinya terdapat transfer kepada usahatani jagung setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* sebesar Rp. 2.207.361. Hal ini terjadi karena usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo membayar biaya aktualnya lebih rendah dibandingkan biaya sosialnya.

Kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* pupuk pada usahatani padi dan jagung berupa tarif impor, PPn, dan subsidi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif 5% dan PPn 10% untuk pupuk mineral/kimia yang mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium. Meskipun kebijakan tarif impor dan PPn membuat harga *input tradable* impor lebih mahal, namun pemerintah menerapkan kebijakan proteksi terhadap konsumen *input tradable* pupuk berupa subsidi. Subsidi *input* pupuk ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yaitu urea Rp. 1.800/kg, ZA Rp. 1400/kg, SP/TSP Rp. 2000, dan NPK Rp. 2.300 /kg (Tabel 4.2) sehingga kebijakan ini mampu memproteksi usahatani. Hal ini mengakibatkan usahatani membayar lebih rendah *input tradable* dan sebagian biaya pembelian ditanggung oleh pemerintah.

b. *Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI)

Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai NPCI < 1 , yaitu sebesar 0,84. Nilai tarif impor dan subsidi ini diberikan atas *input tradable* yaitu pupuk Urea. Hal ini menyebabkan usahatani hanya membayar 84% dari biaya seharusnya dalam kondisi tidak ada kebijakan. Sedangkan untuk usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai NPCI < 1 , yaitu sebesar 0,70. Nilai ini berarti tarif impor dan subsidi diberikan atas *input tradable* yaitu pupuk Urea dan pupuk SP/TSP. Hal ini menyebabkan usahatani hanya membayar 70% dari biaya seharusnya dalam kondisi tidak ada kebijakan.

c. *Transfer Factor* (TF)

Transfer Factor (TF) menunjukkan divergensi atau selisih biaya *input non tradable* pada harga privat dengan harga sosialnya. Nilai *Transfer Factor* (TF) usahatani padi di Kabupaten Ponorogo positif, artinya surplus usahatani padi bertambah secara implisit sebesar Rp. 672.000. Hal ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan lahannya untuk pertanian padi daripada komoditi lain yang menjadi alternatif terbaik setelah padi yaitu kedelai (*opportunity cost of land*). Kedelai dipilih sebagai komoditi dengan *opportunity cost of land*

karena kedelai merupakan komoditi alternatif selain padi yang paling banyak ditanam di tanah/lahan sawah.

Sedangkan nilai *Transfer Factor* (TF) usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo negatif, artinya surplus usahatani jagung berkurang secara implisit sebesar Rp. 1.078.000. Hal ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan lahannya untuk pertanian jagung daripada komoditi lain yang menjadi alternatif terbaik setelah jagung yaitu ketela pohon (*opportunity cost of land*). Ketela pohon dipilih sebagai komoditi dengan *opportunity cost of land* karena ketela pohon merupakan komoditi alternatif selain jagung yang paling banyak ditanam di tanah/lahan ladang (tegal).

Selain itu nilai TF juga dipengaruhi divergensi pada biaya faktor domestik modal pada usahatani padi dan jagung yaitu sebesar negatif Rp. 78.000. nilai negatif ini disebabkan karena tingkat bunga modal kerja berdasarkan harga sosial lebih tinggi (5,6% per musim) daripada tingkat bunga modal kerja berdasarkan harga privat (3% per musim).

3. Kebijakan Input – Output

Kebijakan input – output melihat dampak gabungan yaitu kebijakan komoditas maupun kebijakan *input tradable*. Berdasarkan Tabel 4.5 dampak kebijakan input – output dapat dilihat melalui indikator rasio dalam komponen PAM, antara lain :

a. *Net Transfer* (NT)

Nilai *Net Transfer* (NT) usahatani padi di Kabupaten Ponorogo positif atau $NT > 0$, artinya transfer bersih yang diterima usahatani padi setelah terdapat

kebijakan pemerintah sebesar Rp. 1.353.548. Dapat diartikan juga bahwa nilai Rp. 1.353.548 adalah tambahan surplus usahatani (produsen) akibat adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah pada input – output.

Sedangkan Nilai *Net Transfer* (NT) usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo negatif atau $NT < 0$, artinya transfer bersih yang diterima usahatani jagung setelah terdapat kebijakan pemerintah sebesar negatif 7,37 juta rupiah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah terhadap faktor-faktor produksi yang diperdagangkan dan sumber daya domestik serta harga jagung secara keseluruhan cenderung merugikan petani jagung. Perlindungan pemerintah melalui subsidi pupuk dan kebijakan penetapan harga jagung tidak membuat petani memperoleh keuntungan aktual yang lebih tinggi dari yang seharusnya diterima.

b. *Effective Protection Coefficient* (EPC)

Nilai *Effective Protection Coefficient* (EPC) usahatani padi di Kabupaten Ponorogo > 1 ($EPC = 1,08$) yang artinya bahwa proteksi pemerintah mampu memberi tambahan nilai pendapatan yang diterima petani sebesar 8% lebih tinggi dibandingkan bila tanpa ada kebijakan. Dengan kata lain kebijakan yang diterapkan pemerintah pada input – output usahatani memberikan insentif atau mendorong petani padi untuk berproduksi. Sedangkan Nilai *Effective Protection Coefficient* (EPC) usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo < 1 ($EPC = 0,73$) yang artinya proteksi pemerintah belum mampu memberi tambahan nilai pendapatan yang diterima petani. Dengan kata lain kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input – output usahatani jagung kurang mendukung atau

disintensif pada petani jagung dalam mengembangkan produksi jagung, sehingga petani hanya menerima sekitar 73% dari nilai harga sosial yang sebenarnya.

c. *Profitability Coefficient (PC)*

Nilai *Profitability Coefficient (PC)* usahatani padi di Kabupaten Ponorogo > 1 ($PC = 1,11$) yang artinya bahwa keuntungan privat usahatani padi 1,11 lebih besar dari keuntungan sosial. Hal ini dinyatakan menguntungkan meskipun tanpa adanya kebijakan. Sedangkan nilai *Profitability Coefficient (PC)* usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo < 1 ($PC = 0,67$) yang artinya bahwa petani jagung hanya menerima 67% dari keuntungan nilai harga sosial yang sebenarnya.

d. *Subsidy Ratio to Producers (SRP)*

SRP adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh dampak transfer. Dengan demikian SRP menunjukkan sejauh mana penerimaan (revenue) meningkat atau menurun karena terjadinya transfer. Nilai *Subsidy Ratio to Producers (SRP)* usahatani padi di Kabupaten Ponorogo adalah positif ($SRP = 0,05$) yang artinya bahwa divergensi antara keuntungan finansial dan ekonomi pada usahatani padi sekitar 5% dari pendapatan kotor (*gross profit*). Besarnya transfer yang positif ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah/distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang menguntungkan bagi petani padi, karena menerima subsidi positif dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah. Sedangkan nilai *Subsidy Ratio to Producers (SRP)* usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo adalah negatif ($SRP = -0,19$) yang

artinya bahwa divergensi antara keuntungan finansial dan ekonomi pada usahatani padi sekitar 19% dari pendapatan kotor (*gross profit*). Besarnya transfer yang negatif ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah/distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang merugikan/menurunkan penerimaan dari sistem usahatani bagi petani jagung.

4.3.3. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas digunakan sebagai analisa perubahan pada harga *input* dan *output*. Perubahan pada harga *input* akan berpengaruh kecil terhadap keuntungan dibandingkan dengan perubahan harga *output*. Hal tersebut disebabkan *input* hanya bagian kecil dari total biaya, sedangkan perubahan harga *output* akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan. Kemungkinan perubahan yang terjadi pada harga *input* dan *output* berpengaruh penting terhadap sistem usahatani padi dan jagung berdasarkan analisis sensitivitas adalah :

1. Perubahan Nilai Tukar (Rupiah terhadap US Dollar)

Tabel 4.6
Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Nilai Tukar

No	Indikator Rasio	Nilai Basis		Nilai Tukar 14.000/US\$ (Depresiasi)		Nilai Tukar 12.800/US\$ (Apresiasi)	
		Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung
1	PCR	0,49	0,36	0,49	0,36	0,49	0,36
2	DRCR	0,51	0,30	0,48	0,28	0,53	0,32
3	R/C privat	1,88	2,10	1,88	2,10	1,88	2,10
4	R/C sosial	1,81	2,32	1,89	2,40	1,73	2,24
5	TO	1.574.254	-10.657.530	289.728	-12.321.000	2.833.344	-9.027.000
6	NPCO	1,05	0,72	1,009	0,70	1,10	0,76
7	TI	-451.294	-2.207.361	-486.200	-2.368.800	-417.080	-2.049.120
8	NPCI	0,84	0,70	0,82	0,68	0,84	0,71
9	TF	672.000	-1.078.000	672.000	-1.078.000	672.000	-1.078.000
10	NT	1.353.548	-7.372.168	103.928	-8.874.200	2.578.424	-5.899.880
11	EPC	1,08	0,73	1,02	0,69	1,12	0,76
12	PC	1,10	0,67	1,007	0,62	1,21	0,71
13	SRP	0,05	-0,19	0,003	-0,22	0,09	-0,15

Sumber : Hasil PAM, diolah

Perubahan nilai tukar akan berpengaruh terhadap keuntungan sosial. Asumsi dasar PAM ini menggunakan nilai tukar Rp. 13.394/US\$. Misalnya asumsi yang digunakan ketika rupiah mengalami depresiasi menjadi Rp. 14.000/US\$ dan mengalami apresiasi menjadi Rp. 12.800, maka perubahan sistem usahatani dapat diketahui. Tabel 4.6 memperlihatkan perubahan rasio di dalam Tabel PAM akibat perubahan nilai tukar.

Jika nilai tukar terjadi depresiasi menjadi Rp. 14.000/US\$, maka yang terjadi adalah naiknya harga-harga sosial, sehingga nilai PCR tetap. Untuk nilai DRCR, NPCI, NPCO, EPC, PC, SRP turun sedangkan nilai rasio R/C pada harga sosial naik. Nilai rasio R/C pada harga sosial naik dapat diartikan bahwa ketika nilai tukar mengalami depresiasi, maka tingkat efisiensi sosial (perhitungan penggunaan biaya atas input pada harga sosial) usahatani semakin

meningkat. Dari hasil analisis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan yang ada, penurunan DRCR, NPCI, NPCO, EPC, PC, SRP ketika rupiah melemah (depresiasi) akan berdampak baik (positif) bagi petani. Karena dengan melemahnya rupiah maka kebijakan semakin suportif dan progresif untuk melindungi petani.

Jika nilai tukar mengalami apresiasi menjadi Rp. 12.800/US\$, maka yang terjadi adalah turunnya harga-harga sosial, sehingga nilai PCR tetap. Untuk nilai DRCR, NPCI, NPCO, EPC, PC, SRP naik sedangkan nilai rasio R/C pada harga sosial turun. Nilai rasio R/C pada harga sosial turun dapat diartikan bahwa ketika nilai tukar mengalami apresiasi, maka tingkat efisiensi sosial (perhitungan penggunaan biaya atas input pada harga sosial) usahatani semakin turun. Dengan meningkatnya nilai tukar rupiah akan berdampak buruk bagi petani, karena dengan menguatnya rupiah akan menurunkan keunggulan komparatif usahatani.

2. Perubahan Harga Output

Tabel 4.7
Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Perubahan
Harga Output sebesar 25 Persen

No	Indikator Rasio	Nilai Basis		Penurunan Harga Internasional Output 25%		Kenaikan Harga Domestik Output 25%	
		Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung
1	PCR	0,49	0,36	0,49	0,36	0,38	0,27
2	DRCR	0,51	0,30	0,70	0,43	0,51	0,30
3	R/C privat	1,88	2,10	1,88	2,10	2,34	2,61
4	R/C sosial	1,81	2,32	1,35	1,74	1,81	2,32
5	TO	1.574.254	-10.657.530	8.920.690	-1.018.147	9.314.254	-3.682.530
6	NPCO	1,05	0,72	1,40	0,96	1,31	0,90
7	TI	-451.294	-2.207.361	-451.294	-2.207.361	-451.294	-2.207.361
8	NPCI	0,84	0,70	0,84	0,70	0,84	0,70
9	TF	672.000	-1.078.000	672.000	-1.078.000	672.000	-1.078.000
10	NT	1.353.548	-7.372.168	8.699.984	2.267.214	9.093.548	-397.168
11	EPC	1,08	0,73	1,48	1,05	1,36	0,95
12	PC	1,10	0,67	2,51	0,07	1,69	0,98
13	SRP	0,05	-0,19	0,39	0,07	0,30	-0,01

Sumber : Hasil PAM, diolah

a. Penurunan harga output internasional

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa penurunan harga internasional output sebesar 25% menyebabkan harga komoditas padi dan jagung internasional masing-masing menjadi Rp. 3.061/kg dan Rp. 3.213/kg sehingga nilai PCR dan NPCI tetap. Pada kondisi ini, usahatani padi akan terjadi peningkatan nilai NPCO, DRCR, EPC, PC, dan SRP sedangkan rasio R/C pada harga sosial mengalami penurunan. Keadaan ini menunjukkan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo tetap memiliki daya saing pada nilai finansial dan ekonomis (PCR dan $DRCR < 1$), namun keunggulan komparatif (daya saing pada nilai ekonomis) dan efisiensi pada harga sosial melemah dibandingkan sebelumnya, karena nilai DRCR serta R/C pada harga sosial

masing-masing meningkat menjadi 0,70 dan 0,43 serta R/C masing-masing turun sebesar 1,35 dan 1,74 . Sedangkan untuk nilai EPC usahatani jagung menjadi lebih dari 1 ($EPC = 1,05$) yang artinya bahwa ketika harga internasional turun sebesar 25%, maka proteksi pemerintah telah mampu memberikan tambahan nilai pendapatan yang diterima petani. Dengan kata lain kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input – output usahatani jagung mendukung atau intensif pada petani jagung dalam mengembangkan produksi jagungnya.

b. Kenaikan harga output domestik

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa kenaikan harga domestik output sebesar 25% menyebabkan harga komoditas padi dan jagung domestik masing-masing menjadi Rp. 5.375/kg dan Rp. 3.875/kg nilai DRCR dan NPCI tetap. Pada kondisi ini, usahatani padi dan jagung akan terjadi peningkatan nilai R/C, NPCO, PCR, EPC, PC, dan SRP . Keadaan ini menunjukkan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo tetap memiliki daya saing pada nilai finansial dan ekonomis (PCR dan $DRCR < 1$) dan semakin efisien pada tingkat harga. Bahkan dapat dikatakan kenaikan harga output domestik sebesar 25% semakin meningkatkan daya saing usahatani padi dan jagung baik secara finansial maupun ekonomi.

3. Tarif Impor Komoditas Naik

Tabel 4.8

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Kenaikan Tarif Impor Komoditas

No	Indikator Rasio	Nilai Basis		Tarif Impor Padi Naik Menjadi 500/kg	Tarif Impor Jagung Naik Menjadi 10%
		Padi	Jagung		
1	PCR	0,49	0,36	0,49	0,36
2	DRCR	0,51	0,30	0,50	0,28
3	R/C privat	1,88	2,10	1,88	2,10
4	R/C sosial	1,81	2,32	1,83	2,43
5	TO	1.574.254	-10.657.530	1.343.854	-12.493.530
6	NPCO	1,05	0,72	1,04	0,69
7	TI	-451.294	-2.207.361	-451.294	-2.207.361
8	NPCI	0,84	0,70	0,84	0,70
9	TF	672.000	-1.078.000	672.000	-1.078.000
10	NT	1.353.548	-7.372.168	1.123.148	-9.208.168
11	EPC	1,08	0,73	1,06	0,68
12	PC	1,10	0,67	1,08	0,61
13	SRP	0,05	-0,19	0,03	-0,22

Sumber : Hasil PAM, diolah

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa kenaikan tarif impor komoditas akan membuat harga internasional komoditas menjadi naik sehingga nilai PCR dan NPCI tetap. Pada kondisi ini, usahatani padi dan jagung akan terjadi penurunan nilai NPCO, DRCR, EPC, PC, dan SRP sedangkan rasio R/C sebagai indikator efisiensi meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tarif impor membuat petani semakin diuntungkan karena adanya transfer pendapatan dari konsumen, tetapi hal tersebut akan merugikan konsumen. Besarnya transfer pendapatan tersebut searah dengan besarnya tarif yang berlaku.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo menguntungkan pada harga privat dan harga sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada keuntungan privat serta keuntungan sosial yang bernilai positif.
- b. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai daya saing pada harga privat dan harga sosial yang dilihat dari nilai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif < 1
- c. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo efisien pada harga privat dan harga sosial yang dilihat dari rasio $R/C > 1$
2. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan output (NPCO) telah mampu memproteksi usahatani padi, namun belum mampu memproteksi usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan input (NPCI) telah mampu memproteksi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. Dampak kebijakan gabungan pemerintah berkaitan dengan input-output (EPC) efektif memproteksi usahatani padi, namun belum efektif memproteksi usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo, maka dapat diajukan rekomendasi/saran sebagai berikut :

1. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi padi dan jagung dan efisien dalam penggunaan biaya atas input sehingga dapat dijadikan komoditas andalan Kabupaten Ponorogo dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan produksi padi dan jagung seperti memperluas area penanaman merupakan pilihan terbaik, selain menghemat devisa juga mengurangi ketergantungan pada pasar dunia.
2. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang belum mampu memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif atau tambahan kebijakan agar mampu memproteksi usahatani, dalam hal ini usahatani jagung sebagai penghasil komoditas bahan baku industri pakan ternak.
3. Pemerintah sebagai otoritas penentu impor komoditas beras dan jagung sangat penting untuk memperhatikan perubahan variabel yang memberikan dampak pada kenaikan atau penurunan daya saing usahatani seperti perubahan harga internasional komoditas maupun perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan perubahan tarif impor dengan tetap memperhatikan kondisi pasar dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. R. dan Hanani, N. 2010. *Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani apel di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. AGRISE 10 (1).
- Aprizal. 2013. *Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Kabupaten Mukomuko*. Tesis. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu : Bengkulu
- Aryanto, Bahtiar, Zulkifli Mantau. 2009. *Analisis Daya Saing Usahatani Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPPT) Sulawesi Utara.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Studi Pendahuluan RPJMN Bidang Pangan dan Pertanian, 2015-2019*. Laporan Kajian. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *PDB Sektor Pertanian*. www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi dan Jagung di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015*. www.jatim.bps.go.id
- Coelli, Tim, D.S. Prasada Rao and George E. Battese. 1998. *An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis*. London. IBT Global.
- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Timur. 2013. *Pertanian di Jawa Timur*. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Timur.
- Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. 2015. *Analisa Usahatani Padi dan Jagung Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo.
- Esterhuizen, Dirk, J.V. Royen and Luc D'Haese. 2006. *Determinan of Competitiveness in The South African Agro-Food Fibre Complex*. University of Pretoria
- Esterhuizen, Dirk, J.V. Royen and Luc D'Haese. 2008. *An Evaluation of The Competitiveness Sector in South Africa. Advanced in Competitiveness Research 16 (1-2), 31-46*. University of Pretoria
- Faisal, Basri. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Internasional*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Fatah, Abdul dkk. 2015. *The Policy Analysis Matrix of Profitability and Competitiveness of Rice Farming in Malaysia*. International Conference Of Agricultural Economists. Milan

- Gittinger, J. Price dan Adler. A. Hans. 1993. *Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Hardono S. Gatoet., Handewi P .S Rachman., Sri H. Suhartini. 2004. *Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 22 No. 2, Desember 2004
- Hernanto, Fadholi. 1988. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Jaya, Wihana Kirana. 2001. *Ekonomi Industri Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Kadariah. 1978. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Kuncoro, E. A. 2008. *Leadership sebagai Primary Forces dalam Competitive Strength, Competitive area, Competitive Result guna meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kurniawan AY. 2011. *Analisis Efisiensi Ekonomi dan Daya Saing Jagung Pada Lahan Kering di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan*. Jurnal Agribisnis Pedesaan Vol. 01. Banjarbaru.
- Lindert, Peter H. Dan Charles. P . Kindleberger. 1993. *Ekonomi Internasional. Edisi Kedelapan*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mangkuprawira, S., dan A.V. Hubeis. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mc. Eachern, William A. 2001. *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Terjemahan : Sigit Triandaru
- Miftachuddin A. 2014. *Analisis Efisiensi Faktor–Faktor Produksi Usahatani Padi Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang : Semarang
- Miller, Rogeer LR, Meiners. 2000. *Teori Ekonomi Intermediate Ed. 3*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Monke, E.A, and S.R. Pearson (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Murtiningrum, Fery. 2013. *Analisis Daya Saing Usahatani Kopi Robusta (Coffee Canephora) di Kabupaten Rejang Lebong*. Tesis. Bengkulu: Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

- Nopirin. 1990. *Ekonomi Internasional*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE. Pahan Iyung. 2006. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agri bisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Pearson, Scott., Carl Gotsch, dan Sjaiful Bahri. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2011. *Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.310/12/2015. *Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Prima, Ni Luh. 2016. *Analisis Tingkat Keuntungan Usahatani Padi Sawah Sebagai Dampak dari Adanya Subsidi Pupuk di Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata vol. 5 No. 1, Januari 2016.
- Pudjosumarto, M., 1998. *Evaluasi Proyek*. Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang. Edisi Kedua. Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2014. *Focus Group Discussion Formulasi Kebijakan Mendukung Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, Kedelai 2017*. <http://www.pse.litbang.pertanian.go.id./2627>.
- Rahim, Abd dan Diah Retno Dwi Hastuti. 2008. *Ekonomika Pertanian (Pengantar, Teori, dan Kasus)*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Rajagukguk, Mark Majus. 2009. *Analisis Daya Saing Rumput Laut Indonesia di Pasar Internasional*. Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI 2015 – 2019.
- Rosyidi, Suherman. 2001. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi Terbaru, Cetakan ke 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional (Terjemahan: H. Munandar)*. Jakarta: Erlangga

- Saptana. 2012. *Tinjauan Konseptual Mikro-Makro Daya Saing dan Strategi Pembangunan Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Soekartawi. 1989. *Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : Rajawali Pers
- _____ 2003. *Prinsip Ekonomi Pertanian*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudaryanto, T dan P. Simatupang. 1993. *Arah Pengembangan Agribisnis : Suatu Catatan Kerangka Analisis dalam Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Suparta, Nyoman. 2010. *Memantapkan Strategi Pengelolaan Pertanian*. Denpasar: Pustaka Nayottama
- Suryana dan Adang Agustian. 2014. *Analisis Daya Saing Usahatani Jagung Di Indonesia*. Jurnal. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wolff F., K. Schmitt., C. Hochfeld. (2007). *Competitiveness, Innovation and Sustainability – Clarifying the Concepts and Their Interrelations*. Berlin: Institut fur Angewandte Okologie.

LAMPIRAN

Tabel 1. Gambaran Kondisi Pertanian Kabupaten Ponorogo

Tabel
Table 1.3.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Penggunaan
According to the Sub Area Based on Usage
(Km²)
2015

Kecamatan District	Lahan Pertanian Agricultural Land		Lahan Bukan Pertanian Non Agricultural Land			Luas Kecamatan Total
	Lahan Sawah Rice Field Area	Lahan Bukan Sawah Non Rice Field Area	Pekarangan dan Bangunan House Compound and Surrounding	Hutan Negara Forest	Lainnya Others	
1 Ngrayun	1.317	16.568	591	-	-	18.476
2 Slahung	2.166	6.301	567	-	-	9.034
3 Bungkai	1.712	3.128	561	-	-	5.401
4 Sambit	1.120	4.514	349	-	-	5.983
5 Sawoo	1.507	10.294	670	-	-	12.471
6 Sooko	1.055	4.233	245	-	-	5.533
7 Pudak	213	4.576	103	-	-	4.892
8 Pulung	2.392	8.636	1.727	-	-	12.755
9 Mirak	1.361	1.890	469	-	-	3.720
10 Siman	1.562	1.938	295	-	-	3.795
11 Jetis	1.429	126	686	-	-	2.241
12 Balong	2.402	2.626	668	-	-	5.696
13 Kauman	2.105	1.041	515	-	-	3.661
14 Jambon	1.413	3.683	652	-	-	5.748
15 Badegan	891	3.762	582	-	-	5.235
16 Sampung	1.910	5.459	692	-	-	8.061
17 Sukorejo	3.396	1.615	947	-	-	5.958
18 Ponorogo	810	296	1.125	-	-	2.231
19 Babeden	3.060	752	581	-	-	4.393
20 Jenangan	2.714	2.452	778	-	-	5.944
21 Ngebel	266	5.292	392	-	-	5.950
Jumlah / Total 2015	34.801	89.182	13.195	-	-	137.178
Jumlah / Total 2014	34.638	87.626	14.914	-	-	137.178

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
Source : Crops Service Office of Ponorogo Regency

Tabel
Table 5.2.1.

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Per Ha Tanaman Pangan
Harvested Area and Production and Yield Rate of Food Crops
2015

Kecamatan District	Padi (Sawah dan Ladang) Paddy		
	Luas Panen Harvested Area (Ha)	Produksi Production (Ku)	Rata-rata Produksi Yield Rate (Ku / Ha)
1	2	3	4
1 Ngrayun	2.257	142.669	63,21
2 Slahung	3.553	229.417	64,57
3 Bungkal	3.464	223.670	64,57
4 Sambit	1.884	121.580	64,53
5 Sawoo	2.571	162.640	63,26
6 Sooko	1.994	128.753	64,57
7 Pudak	484	31.252	64,57
8 Pulung	5.684	367.016	64,57
9 Mlarak	2.617	168.980	64,57
10 Siman	2.506	161.812	64,57
11 Jetis	2.851	184.089	64,57
12 Balong	5.358	331.692	61,91
13 Kauman	4.367	281.977	64,57
14 Jambon	3.324	212.384	63,89
15 Badegan	2.473	159.682	64,57
16 Sampung	3.380	218.247	64,57
17 Sukorejo	7.726	498.868	64,57
18 Ponorogo	1.919	123.910	64,57
19 Babadan	7.258	468.649	64,57
20 Jenangan	6.279	402.510	64,10
21 Ngebel	600	38.742	64,57
Jumlah / Total 2015	72.549	4.658.538	64,21
Jumlah / Total 2014	69.506	4.419.584	63,59
Jumlah / Total 2013	70.100	4.268.001	60,88
Jumlah / Total 2012	66.618	4.276.523	64,19
Jumlah / Total 2011	64.271	3.266.681	50,83

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
Source : Crops Service Office of Ponorogo Regency

Tabel
Table 5.2.1.

Tabel Lanjutan / Continued :

Kecamatan District	Jagung Corn			Ubi Kayu Cassava		
	Luas Panen Harvested Area (Ha)	Produksi Production (Ku)	Rata-Rata Produksi Yield Rate (Ku / Ha)	Luas Panen Harvested Area (Ha)	Produksi Production (Ku)	Rata-Rata Produksi Yield Rate (Ku / Ha)
1 Ngrayun	925	63.094	68,21	4.501	860.366	191,15
2 Slahung	3.933	268.270	68,21	1.215	232.247	191,15
3 Bungkal	2.086	142.286	68,21	1.175	224.601	191,15
4 Sembit	2.676	182.530	68,21	841	160.757	191,15
5 Sawoo	6.829	465.806	68,21	4.041	772.437	191,15
6 Soko	1.372	93.584	68,21	1.265	241.805	191,15
7 Pudak	1.287	87.786	68,21	75	14.336	191,15
8 Pulung	2.807	191.465	68,21	2.169	414.604	191,15
9 Mirak	1.733	118.208	68,21	537	102.648	191,15
10 Siman	1.047	71.416	68,21	105	20.071	191,15
11 Jetis	620	42.290	68,21	50	9.558	191,15
12 Balong	727	49.589	68,21	339	64.800	191,15
13 Kauman	1.379	94.062	68,21	228	43.582	191,15
14 Jambon	1.506	102.724	68,21	1.732	331.072	191,15
15 Badegan	670	45.701	68,21	325	62.124	191,15
16 Sampung	2.080	141.877	68,21	700	133.805	191,15
17 Sukorejo	922	62.890	68,21	-	-	-
18 Ponorogo	132	9.004	68,21	5	956	191,15
19 Babedan	512	34.924	68,21	20	3.823	191,15
20 Jenangan	1.342	91.538	68,21	1.310	250.407	191,15
21 Ngebel	900	61.389	68,21	1.163	222.307	191,15
Jumlah / Total 2015	35.485	2.420.432	68,21	21.796	4.166.305	191,15
Jumlah / Total 2014	32.800	1.970.624	60,08	22.585	5.828.737	258,08
Jumlah / Total 2013	35.690	2.565.397	71,88	22.413	5.360.069	239,15
Jumlah / Total 2012	35.205	2.413.303	68,55	24.092	6.817.795	282,99
Jumlah / Total 2011	34.307	1.760.635	51,32	24.218	5.645.942	233,13

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
Source : Crops Service Office of Ponorogo Regency

Tabel 2.**Harga Paritas Impor Pupuk Urea dan TSP/SP**

Deskripsi	Urea	TSP/SP
FOB (\$/ton)		
➤ FOB Yuzhnyy (\$/ton)	200	-
➤ FOB Tunisian (\$/ton)	-	284
Pengapalan dan asuransi (<i>freight and insurance</i>) (\$/ton)	88	94
CIF pelabuhan Tanjung Perak (\$/ton)	288	378
Nilai Tukar (Rp/\$)	13.394	13.394
Premium Nilai Tukar (%)	0,0	0,0
Nilai Tukar Equilibrium	13.394	13.394
CIF Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/ton)	3.857.472	5.062.932
Faktor konversi berat (dari ton ke kg) (kg/ton)	1000	1000
CIF Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/kg)	3.857,47	5.062,93
Bongkar muat pelabuhan (Rp/kg)	54	54
Harga paritas impor Jawa Timur (Rp/kg)	3911,47	5116,93
Transportasi ke Ponorogo (Rp/kg)	115	115
Nilai sebelum pengolahan (Rp/kg)	4026,47	5231,93
Faktor konversi	100 %	100 %
Biaya distribusi ke tingkat petani (Rp/kg)	30	30
Harga paritas impor tingkat petani (Rp/kg)	4.056,47	5.261,93

Sumber : World Bank (2015)

Badan Pusat Statistik (2015)

Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (2015)

Tabel 3.

Harga Paritas Impor untuk Beras dan Jagung

Deskripsi	Padi/Beras	Jagung
FOB (\$/ton)		
➤ FOB Bangkok (Thailand) kadar pecah 25% (\$/ton)	415	-
➤ FOB Gulf port (US) (\$/ton)	-	169
Pengapalan dan asuransi (<i>freight and insurance</i>) (\$/ton)	45	136
CIF pelabuhan Tanjung Perak (\$/ton)	460	305
Nilai Tukar (Rp/\$)	13.394	13.394
Premium Nilai Tukar (%)	0,0	0,0
Nilai Tukar Equilibrium	13.394	13.394
CIF Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/ton)	6.161.240	4.085.170
Faktor konversi berat (dari ton ke kg) (kg/ton)	1000	1000
CIF Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/kg)	6.161,24	4.085,17
Bongkar muat pelabuhan (Rp/kg)	54	54
Harga paritas impor Jawa Timur (Rp/kg)	6215,24	4139,17
Transportasi ke Ponorogo (Rp/kg)	115	115
Nilai sebelum pengolahan (Rp/kg)	6330,24	4139,17
Faktor konversi	64 %	100 %
Biaya distribusi ke tingkat petani (Rp/kg)	30	30
Harga paritas impor tingkat petani (Rp/kg)	4081,35	4284,17

Sumber : World Bank (2015)

Badan Pusat Statistik (2015)

Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (2015)

Tabel 4**Bujet Privat Input dan Output Usahatani Padi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015**

Input/Output	Jumlah	Harga Privat (Rp)	Jumlah (Rp)
Input Tradable			
Pupuk Anorganik (kg/ha)			
➤ Urea	200	1.800	360.000
➤ ZA	-	-	-
➤ SP	-	-	-
➤ Phonska	300	2.300	690.000
Pupuk Organik (kg/ha)			
➤ Bokhasi	1000	500	500.000
Pengendalian OPT (Pestisida)			
➤ Vertilisium (lt/ha)	10	25.000	250.000
➤ Reagen (kg/ha)	14	8.500	119.000
Benih (Varietas Ciherang) (kg/ha)	35	12.000	420.000
Total Input Tradabel			2.339.000
Faktor Domestik			
Ongkos Tenaga Kerja			
➤ Olah Lahan/Traktor (unit/ha)	1	1.050.000	1.050.000
➤ Persemaian (HOK/ha)	4	60.000	240.000
➤ Cabut Bibit (HOK/ha)	14	60.000	840.000
➤ Tanam (Borongan)	1	840.000	840.000
➤ Penyiangan (HOK/ha)	14	60.000	840.000
➤ Pemupukan (HOK/ha)	12	60.000	720.000
➤ Pengendalian OPT (HOK/ha)	6	60.000	360.000
➤ Panen (Bawon 1/8 panen)	1	3.330.000	3.330.000
➤ Perontok (HOK/ha)	-	-	-
Total Tenaga Kerja			8.220.000
Modal			
Modal Kerja	Rp. 3.000.000	3,0 %	90.000
Sewa Alat (Air) (kali/ha)	40	15.000	600.000
Total Modal			690.000
Sewa lahan per Ha	1	5.250.000	5.250.000
Output			
GKG (kg)	7200	4.300	30.960.000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah

Tabel 5
Budget Privat Input dan Output Usahatani Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Input-Output	Jumlah	Harga Privat (Rp)	Jumlah (Rp)
Input Tradable			
Pupuk Anorganik (kg/ha)			
➤ Urea	400	1.800	720.000
➤ ZA	400	1.400	560.000
➤ SP	400	2.000	800.000
➤ Phonska	400	2.300	920.000
Pupuk Organik (kg/ha)			
➤ Petroganik	1000	500	500.000
Pengendalian OPT (Pestisida)			
➤ Vertilisium (lt/ha)	-	-	-
➤ Reagen (kg/ha)	-	-	-
Benih (Varietas Bisi - 2) (kg/ha)	25	65.000	1.625.000
Total Input Tradabel			5.125.000
Faktor Domestik			
Ongkos Tenaga Kerja			
➤ Olah Lahan (HOK/ha)	30	50.000	1.500.000
➤ Persemaian (HOK/ha)	-	-	-
➤ Cabut Bibit (HOK/ha)	-	-	-
➤ Tanam (HOK/ha)	30	50.000	1.500.000
➤ Penyiangan (HOK/ha)	30	50.000	1.500.000
➤ Pemupukan (HOK/ha)	8	50.000	400.000
➤ Pengendalian OPT (HOK/ha)	-	-	-
➤ Panen (Bawon 1/8 panen)	-	-	-
➤ Perontok /ha	1	900.000	900.000
Total Tenaga kerja			5.800.000
Modal			
Modal Kerja	3.000.000	3,0 %	90.000
Sewa Alat (Air) (kali/ha)	20	15.000	300.000
Total Modal			390.000
Sewa lahan per Ha	1	2.000.000	2.000.000
Output			
Pipilan Kering (kg)	9000	3.100	27.900.000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah

Tabel 6
Budget Sosial Input dan Output Usahatani Padi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Input/Output	Jumlah	Harga Sosial (Rp)	Jumlah (Rp)
Input Tradable			
Pupuk Anorganik (kg/ha)			
➤ Urea	200	4.056,47	811.294
➤ ZA	-		
➤ SP	-		
➤ Phonska	300	2.300	690.000
Pupuk Organik (kg/ha)			
➤ Bokhasi	1000	500	500.000
Pengendalian OPT (Pestisida)			
➤ Vertilisium (lt/ha)	10	25.000	250.000
➤ Reagen (kg/ha)	14	8.500	119.000
Benih (Varietas Ciherang) (kg/ha)	35	12.000	420.000
Total Input Tradabel			2.790.294
Faktor Domestik			
Ongkos Tenaga Kerja			
➤ Olah Lahan/Traktor (unit/ha)	1	1.050.000	1.050.000
➤ Persemaian (HOK/ha)	4	60.000	240.000
➤ Cabut Bibit (HOK/ha)	14	60.000	840.000
➤ Tanam (Borongan)	1	840.000	840.000
➤ Penyiangan (HOK/ha)	14	60.000	840.000
➤ Pemupukan (HOK/ha)	12	60.000	720.000
➤ Pengendalian OPT (HOK/ha)	6	60.000	360.000
➤ Panen (Bawon 1/8 panen)	1	3.330.000	3.330.000
➤ Perontok (HOK/ha)	-	-	-
Total Tenaga Kerja			8.220.000
Modal			
Modal Kerja	Rp. 3.000.000	5,6 %	168.000
Sewa Alat (Air) (kali/ha)	40	15.000	600.000
Total Modal			768.000
Sewa lahan per Ha	1	4.500.000	4.500.000
Output			
GKG (kg)	7200	4081,35	29.385.745

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah

*) Diperoleh dari perhitungan harga paritas impor (Tabel 2 dan Tabel 3)

Tabel 7

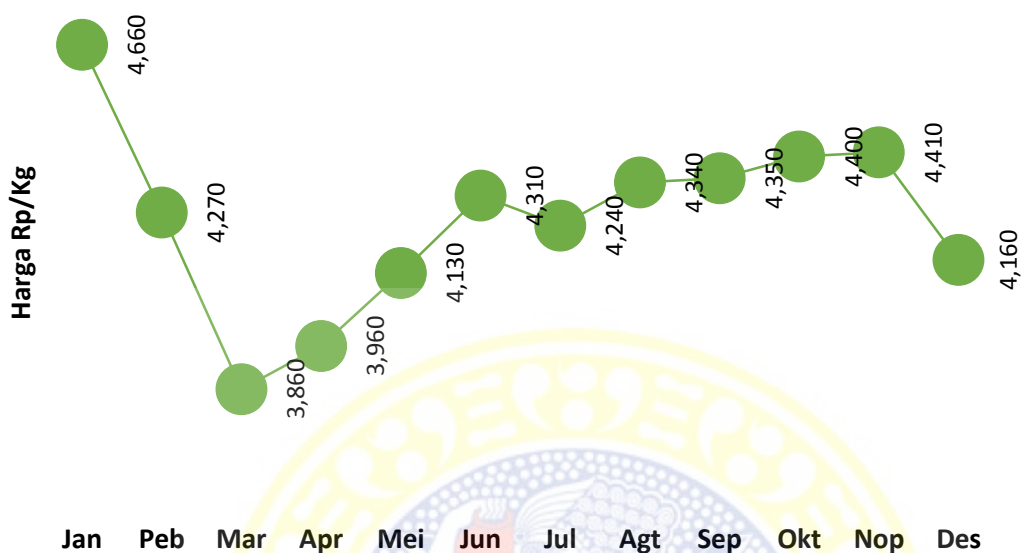
Budget Sosial Input dan Output Usahatani Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Input-Output	Jumlah	Harga Sosial (Rp)	Jumlah (Rp)
Input Tradable			
Pupuk Anorganik (kg/ha)			
➤ Urea	400	4.056,47	1.622.588
➤ ZA	400	1.400	560.000
➤ SP	400	5.261,93	2.104.772
➤ Phonska	400	2.300	920.000
Pupuk Organik (kg/ha)			
➤ Petroganik	1000	500	500.000
Pengendalian OPT (Pestisida)			
➤ Vertilisium (lt/ha)	-	-	-
➤ Reagen (kg/ha)	-	-	-
Benih (Varietas Bisi - 2) (kg/ha)	25	65.000	1.625.000
Total Input Tradabel			7.332.361
Faktor Domestik			
Ongkos Tenaga Kerja			
➤ Olah Lahan (HOK/ha)	30	50.000	1.500.000
➤ Persemaian (HOK/ha)	-	-	-
➤ Cabut Bibit (HOK/ha)	-	-	-
➤ Tanam (HOK/ha)	30	50.000	1.500.000
➤ Penyiangan (HOK/ha)	30	50.000	1.500.000
➤ Pemupukan (HOK/ha)	8	50.000	400.000
➤ Pengendalian OPT (HOK/ha)	-	-	-
➤ Panen (Bawon 1/8 panen)	-	-	-
➤ Perontok /ha	1	900.000	900.000
Total Tenaga Kerja			5.800.000
Modal			
Modal Kerja		5,6 %	168.000
Sewa Alat (Air) (kali/ha)	20	15.000	300.000
Total Modal			468.000
Sewa lahan per Ha	1	3.000.000	3.000.000
Output			
Pipilan Kering (kg)	9000	4284,17	38.557.530

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah

*) Diperoleh dari perhitungan harga paritas impor (Tabel 2 dan Tabel 3)

Rata-rata Harga Gabah (Rp/Kg) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015



Tabel 8

Harga Benih Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo 2011-2015

Tahun	Harga Benih/kg	
	Padi (Ciherang)	Jagung (Bisi-2 dan Bisi-18)
2011	Rp. 10.000	Rp. 62.000
2012	Rp. 11.000	Rp. 63.000
2013	Rp. 11.000	Rp. 63.000
2014	Rp. 12.000	Rp. 65.000
2015	Rp. 12.000	Rp. 65.000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah

Tabel 9. Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis dan Harga
Production of Rice and Crops Planted by Type and Price
2014 - 2015

Jenis Tanaman <i>Kind of Plant</i>	Produksi <i>Production</i>		Harga Produsen <i>Producer Price</i>		Keterangan <i>Explanation</i>
	2014 (Kuintal)	2015 (Kuintal)	2014 (Rp./Kg)	2015 (Rp./Kg)	
				5	
1. Padi <i>Rice</i>	4.276.523	4.268.001	4.200	4.300	GKG
2. Jagung <i>Corn</i>	2.413.303	2.565.397	2.900	3.100	Pipilan Kering
3. Ubi Kayu <i>Cassava</i>	6.817.795	5.360.069	2.500	2.500	Umbi Basah
4. Ubi Jalar <i>Sweet Potato</i>	6.149	7.859	2.600	2.600	Umbi Basah
5. Kacang Tanah <i>Peanut</i>	48.795	29.698	14.500	14.700	Ose Kering
6. Kacang Hijau <i>Green Bean</i>	15.771	11.681	7.500	8.000	Ose Kering
7. Kedelai <i>Soybean</i>	222.541	160.232	5.500	8.500	Ose Kering

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

Source : *Crops Service Office of Ponorogo Regency*